

**ANALISIS PEMBAGIAN PIUTANG DEBITUR PAILIT SAAT  
KEDUDUKAN BOEDEL/HARTA PAILIT TIDAK CUKUP (STUDI  
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 57/Pdt.Sus-  
Renvoi/Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

**TESIS**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan**

**Oleh**

**CALVIN MORRIS  
NPM: 1620020015**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : CALVIN MORRIS  
Nomor Pokok Mahasiswa :1620020015  
Prodi/Konsentrasi :MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul Tesis :ANALISIS PEMBAGIAN PIUTANG DEBITUR PAILIT SAAT  
KEDUDUKAN BOEDEL/HARTA PAILIT TIDAK CUKUP  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR  
57/PDT.SUSRENOI/PROSEDUR/2011/PN.NIAGA.JKT.PST)

Disetujui untuk disampaikan kepada

### **PANITIA UJIAN TESIS**

Medan,.....

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.)

(Dr. H. Suprayitno, S.H., Sp.N., M.Kn.)

## DAFTAR ISI

Halaman

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	12
1. Kerangka Teori .....	12
2. Konsepsi .....	16
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Sifat Penelitian .....	18
3. Sumber Data .....	19
4. Teknik Pengumpulan Data .....	20
5. Analisis Data .....	20

### BAB II PROSES PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT PASCA PUTUSAN PAILIT.....22

A. Tinjauan Kepailitan Secara Umum .....	22
1. Pengertian dan syarat Kepailitan .....	22
2. Subjek dalam Kepailitan .....	24
3. Asas-asas dalam Hukum Kepailitan .....	26
4. Tujuan dan Fungsi Kepailitan .....	28
B. Proses Pengurusan Harta Pailit .....	30
1. Tugas dan kewenangan kurator dalam pengurusan harta pailit .....	32
2. Proses pengurusan harta pailit .....	37
C. Proses Pemberesan Harta Pailit .....	42
1. tugas kurator dalam pemberesan harta debitor pailit ....	42
2. Proses pemberesan harta pailit .....	43

### BAB III PEMBAGIAN HARTA PAILIT TERHADAP KEDUDUKAN KREDITOR PREFEREN DAN KREDITOR SEPARATIS BILA HARTA YANG DIBAGI TIDAK CUKUP..... 49

A. Asas Yang Diantut Dalam Pembagian Harta Pailit .....	52
B. Perbedaan Kedudukan Kreditor Preferen Dan Kreditor Separatis Dalam Hak Memperoleh Harta Pailit .....	52
1. Kedudukan kreditor preferen sebagai kedudukan yang harus didahulukan menurut undang-undang .....	52
2. Kedudukan kreditor separatis sebagai hak yang dijamin dengan objek kebendaan menurut undang-undang .....	57
C. Analisis Pembagian Harta Pailit .....	61
1. Harta pailit tidak cukup .....	61
2. Pembagian harta pailit tidak mencukupi terhadap	

tuntutan piutang oleh kreditor.....	64
<b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MENURUT ASAS KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PERKARA PENGADILAN NIAGA NOMOR 57/ PDT. SUS- RENVOI PROSEDUR/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.....</b>	<b>71</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan .....</b>	<b>71</b>
<b>B. Tentang Duduk Perkara di .....</b>	<b>77</b>
1. Duduk Perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat .....	77
a. Alasan mengajukan gugatan.....	77
b. Pertimbangan dan putusan hakim.....	84
2. Dalam duduk perkara perdata khusus di tingkat kasasi.....	87
a. Alasan mengajukan gugatan.....	87
b. Pertimbangan dan putusan hakim Mahkamah Agung.....	90
3. Dalam duduk perkara di tingkat Peninjauan Kembali Tentang keberatan daftar pertama.....	91
a. Alasan mengajukan gugatan.....	91
b. Pertimbangan dan putusan hakim Mahkamah Agung.....	95
<b>C. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Berdasarkan Asas Keadilan Dan Kemanfaatan .....</b>	<b>96</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>107</b>

**Daftar Pustaka.....**

## ABSTRAK

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Pengangkatan kurator berdasarkan pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator, apabila dihadapkan pada kreditor sebagai para pihak yang memiliki hak atas piutang debitor pailit tentu dalam hal ini kurator harus membagi sesuai dengan porsi mereka masing masing dengan melihat kedudukan kreditor sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait dengan hak-hak atas piutang pailit yang didahulukan yakni antara kreditor preferen dan kreditor separatis Terdapat satu kasus dimana kedudukan kreditor separatis dalam hal ini dibagi rata dengan kedudukan kreditor preferen khususnya dalam hal pembagian harta pailit debitor tidak mencukupi oleh sebab itu dalam penelitian ini akan difokuskan masalah penelitian tentang pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit, pembagian harta pailit antara kreditor preferen dan kreditor separatis apabila harta tidak mencukupi serta pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/pdt.Sus-remvoi prosedur 2011/Pn. Niaga Jkt Pst.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Data-data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan ditafsirkan secara logis, sistematis dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

Dari hasil penelitian diketahui proses pengurusan harta pailit dilakukan pasca diputus oleh hakim pengadilan dan menyita harta debitor pailit oleh kurator, dalam pengurusan ini kurator akan memanggil para kreditor untuk mencocokkan tagihan piutang dengan mengadakan rapat verifikasi, rapat perdamaian dan rapat lain sementara pada pemberesan apabila tidak ada kesepakatan perdamaian maka kurator akan menjual serta membagi harta yang telah terkumpul tersebut dikurangi dengan biaya kepailitan dan sisanya akan dibagi kepada para kreditor, sementara itu bila harta pailit tidak cukup maka kreditor dapat menempuh upaya hukum melalui remvoi prosedur, sementara kurator tetap akan menjalankan tugasnya untuk melakukan pembagian sesuai dengan prinsip *pari passu pro rata parte*, sedangkan dalam putusan hakim pada tingkat pengadilan niaga, kasasi dan peninjauan kembali telah mencerminkan keadilan dan keseimbangan bagi para pihak sebab dalam putusan hakim tetap mempertimbangkan porsi dari kedudukan kreditor preferen lebih besar dari hasil pemberesan harta pailit yang kemudian sisanya dibagi kepada kreditor lain secara berkeadilan.

**Kata Kunci : Kreditor, Kurator, Harta Pailit**

## **ABSTRACT**

The curator is one of the parties that has enough role in a bankruptcy case process. The appointment of a curator is based on the decision of the bankruptcy statement, in the sense that in the decision of the bankruptcy statement must be declared the appointment of a curator, if faced with creditors as parties who have the right to the bankrupt debtor's receivable of course in this case the curator must divide according to their respective portion by looking the position of the creditor is in accordance with the provisions of the law relating to the rights to bankruptcy receivables that take precedence, namely between separatist creditor and creditor. There is one case where the position of a separatist creditor in this case is divided equally by the position of preferential creditors especially in the case of insufficient therefore in this study the research problem will be focused on the management and settlement of bankrupt debtor assets, the distribution of bankrupt assets between preferred creditors and separatist creditors if insufficient property and judges' consideration in the court decision. 57 / pdt. Sus-renvoi procedure 2011 / Pn. Niaga Jkt Pst.

The research method used is a normative juridical approach that is analytical descriptive, data collection is done using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary materials as the main data. The data obtained is then processed, analyzed and interpreted logically, systematically using deductive thinking methods.

From the results of the study, it was found that the bankruptcy management process was carried out after being decided by a court judge and confiscating the assets of the bankrupt debtor by the curator. In this arrangement the curator would summon the creditors to match the receivables bill by holding verification meetings, peace meetings and other temporary meetings in case there were no peace agreement then the curator will sell and divide the collected property minus the bankruptcy fee and the remainder will be shared with creditors, meanwhile if the insolvent property is insufficient then the creditor can take legal remedies through renouncing the procedure, while the curator will continue to carry out the division in accordance with the principle of *pari passu pro rata parte*, whereas in the judge's decision at the commercial court, cassation and reconsideration levels have reflected justice and balance for the parties because in the judge's decision still consider the portion of the credentials position preferential choice is greater than the proceeds of the bankrupt assets which are then distributed to other creditors fairly.

**Keywords:** Creditors, Receivers, Bankruptcy Asset

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia pengaturan hukum khususnya tentang kepailitan sebenarnya telah ada tetapi masih mengadopsi Undang-Undang Kepailitan warisan Belanda yang lebih ditujukan untuk menampung kasus-kasus perusahaan perdagangan sederhana, yang umumnya masih dalam bentuk perorangan. Sehingga yang dicakup hanyalah kepailitan pedagang. Belum berkembangnya kultur perusahaan di Indonesia berpengaruh terhadap penyelesaian Kepailitan yang lebih mempergunakan pendekatan personal.<sup>1</sup>

Realisasi dan tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam *Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 juncto *Staatsblaad* Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-Undang,

---

<sup>1</sup> Retnowulan Sutantio, Kesiapan Dunia Usaha Menghadapi Berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional RUU tentang kepailitan diselenggarakan oleh BPHN – Dep.Keh. bekerjasama dengan ELIPS Project, Jakarta, Tgl. 27-28 juli 1998 dalam Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Edisi 2*, (Jakarta:SoftMedia, 2010)., hal. 6.



akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tujuan utama dari perubahan tersebut diatas adalah untuk memberikan keseimbangan antara kreditor dan debitor menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.<sup>2</sup>

Umumnya Undang-Undang Kepailitan berkaitan dengan utang debitor dan piutang atau tagihan kreditor.<sup>3</sup> Didalam kepailitan juga memiliki lembaga. Lembaga Hukum Kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang diantara debitor dan para kreditornya.<sup>4</sup> Akibat hukum kepailitan terhadap debitor pailit mengakibatkan terjadinya sita umum atas kekayaan debitor, hakikat dari sita umum bahwa kepailitan adalah menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta menghentikan lalulintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.<sup>5</sup> Terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor tidak lagi berwenang melakukan pengurusan dari

---

<sup>2</sup> Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 5.

<sup>3</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Pengertian Utang Dalam Kepailitan*, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Januari 2002), hal. 46.

<sup>4</sup> Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, (Jakarta: Intermedia, 2001), hal. 230.

<sup>5</sup> Hadi Shubban, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 164.

segala perbuatan hukum atas harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan dan demi hukum kepengurusan tersebut beralih kepada kurator.<sup>6</sup>

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Pengangkatan kurator berdasarkan pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator.<sup>7</sup> Pihak yang bertindak sebagai Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya, yaitu orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Secara tegas juga disebutkan dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 1998 bahwa dalam hal kepailitan maupun PKPU dikabulkan, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas yang akan mengawasi pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator dan tugas pengawasan atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengalihan hak-hak

---

<sup>6</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, (Surabaya : LaksBang Justitia Surabaya, 2015), hal. 72.

<sup>7</sup> Irida Dewi Amrih Suci, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, (Yogyakarta:Laksbang Pressindo, 2011), hal. 79.

debitor atas harta debitor yang dilakukan oleh pengurus bersama-sama dengan debitor.<sup>8</sup>

Menurut Kartono, kepailitan mengandung syarat-syarat yuridis sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Adanya debitor.
2. Adanya kreditor.
3. Adanya hutang.
4. Minimal satu hutang sudah jatuh tempo.
5. Minimal satu hutang dapat ditagih.
6. Kreditor lebih dari satu.
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh putusan pengadilan

Sedangkan pailit menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disingkat UUKPKPU dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Hal yang utama dalam subjek hukum kreditor terbagi menjadi 3 (tiga) yakni kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Kreditor preferen adalah kreditor yang karena sifat utangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit, kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri sedangkan Kreditor Konkuren dikenal juga dengan istilah kreditor

---

<sup>8</sup> Seminar Sehari Revitalisasi, *Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas dan Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hal. 56.

<sup>9</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramitha), 1974, hal.5.

bersaing, kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan hak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut ( berbagi secara *pari passu prorata parte*).<sup>10</sup>

Dalam praktiknya mengenai pengurusan sampai pemberesan harta pailit terkadang masih berselisih pendapat mengenai jumlah harta yang dibagi khususnya oleh kurator sebagai pihak yang memang ditunjuk oleh Undang-Undang Kepailitan dalam menyelesaikan persoalan tersebut akan tetapi salah satu kreditornya yakni kreditor preferen mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Niaga atas pembagian harta pailit yang tidak adil menurutnya oleh karena itu perlu setidaknya untuk dikaji ulang mengenai pembagian harta pailit khususnya dalam pembagian harta pailit tersebut tidak cukup

Gambaran lebih lanjut pada penelitian tesis ini dalam hal terdapat kasus bermula dari PT. Yinchenindo Mining Industry mengajukan pailit dan diterima oleh hakim dan pada akhirnya dinyatakan pailit oleh pengadilan dan karena adanya ketidakpuasan oleh salah satu kreditor maka muncullah gugatan yang masuk kedalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/PDT.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana kreditor pailit bertindak selaku kreditor pajak merasa hak dari pembagian

---

<sup>10</sup> J. Andy Hartanto, *Op.Cit.*, hal. 146.

harta pailit yang dibagi oleh kurator tidak sesuai, hak kreditor pajak seharusnya diutamakan terlebih dahulu atas hak hak kreditor lain adapun nilai tuntutan dari kreditor pajak dalam kedudukannya selaku kreditor preferen adalah sebesar Rp 90.717.108.949,- (sembilan puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) akan tetapi saldo yang akan dibagi kepada kreditor setelah dikurangi biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator adalah sebesar Rp Rp.4.701.119.492 (empat milyar tujuh ratus satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).<sup>11</sup>

Jumlah saldo yang akan dibagikan kepada para kreditor yang sebesar Rp.4.701.119.492 (empat milyar tujuh ratus satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), Pemohon akan menerima total Rp.2.938.199.683,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) atau sekitar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) sedangkan kreditor separatis Tennant Metals Pty.Ltd (selaku pemegang hak fidusia terhadap harta pailit tersebut) hanya menerima Rp.1.762.919.810 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).<sup>12</sup>

Sementara itu kedudukan kurator menurut kreditor pajak (Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua) selanjutnya disingkat

---

<sup>11</sup>Dalam Nota Pembelaan Kurator dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 57/PDT. SUS- RENVOI PROSEDUR /2011 /PN.NIAGA.JKT.PST.

<sup>12</sup> *Ibid.*

KPP dalam menjalankan tugasnya membagi harta pailit termasuk perbuatan pelanggaran dan perlawanan terhadap undang-undang sebab dalam hal ini Hakim Pengawas PT. Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit) yang menyetujui Penyusunan Daftar Pembagian tidak sesuai dengan undang-undang dan merupakan perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan negara/pendapatan pajak. Menurut penggugat apabila harta pailit/boedel tidak cukup maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Kurator dalam hal ini sebagai Wakil PT. Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau secara renteng terhadap pelunasan sisa piutang pajak yang tidak dilunasi kurator.<sup>13</sup>

Ketidakpuasan dari KPP setelah hakim membatalkan gugatan penggugat di Pengadilan Niaga, KPP mengajukan banding ke tingkat kasasi, dan pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung memiliki pandangan yang sama dengan hakim pada tingkat pengadilan niaga. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt. Sus -Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt Pst tanggal 7 Juli 2014 tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan kasasi tetap menguatkan putusan

---

<sup>13</sup> Tentang pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

Pengadilan Niaga, dan setelah pada tingkat kasasi juga ditolak maka upaya hukum terakhir yang dilakukan dengan peninjauan kembali.<sup>14</sup>

Peninjauan kembali hakim pada kesimpulannya juga tetap menguatkan Putusan Mahkamah Agung, hakim menilai pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung tidak ditemukannya suatu kekilafan dan ataupun kekeliruan yang nyata dimana dalam pemberesan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua hutang debitor maka pembagian dilakukan sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan.<sup>15</sup>

Apabila mengacu pada gugatan kreditor pajak secara jelas kreditor pajak mengkehendaki seluruh piutang yang ditagih untuk dilunasi dari harta pailit tanpa memperhitungkan keberadaan kreditor lain seperti kreditor Separatis dan kreditor lainnya, sementara itu apabila seluruh piutang kreditor pajak dipenuhi maka dalam hal ini akan berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi kreditor separatis dimana harta debitor pailit tadi tidak cukup menutupi piutang kreditor lain.

Oleh karena kedudukan dari kreditor pajak selaku kreditor preferen dalam hal ini akan dikaji lebih lanjut dan sebab permasalahan pembagian harta pailit tersebut menimbulkan polemik sebagaimana dalam kasus yang dibahas tersebut kreditor preferen memiliki kedudukan yang istimewa akan tetapi dalam pengadilan kreditor preferen tetap saja tidak mendapatkan hak atas gugatannya tersebut.

---

<sup>14</sup> Tentang pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

<sup>15</sup> Tentang pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit.2015.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam hal inilah yang menjadi alasan untuk memilih judul “Analisis Pembagian Piutang Debitor Pailit Saat Kedudukan Boedel/Harta Pailit Tidak Cukup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi /Prosedur/2011/Pn. Niaga.Jkt. Pst)”

### **B.Perumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit pasca debitor di putus pailit oleh hakim pengadilan ?
2. Bagaimana pembagian harta pailit terhadap kedudukan kreditor preferen dan kreditor separatis bila harta debitor pailit tidak cukup?
3. Bagaimana analisis pertimbangan putusan hakim menurut asas keadilan dalam perkara Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-renvoi prosedur/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana proses pemberesan harta debitor pailit.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pembagian harta pailit terhadap kedudukan kreditor preferen dan kreditor separatis bila harta debitor pailit tidak cukup.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Apakah putusan hakim telah sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan dalam hukum dalam



perkara Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-renvoi  
prosedur/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

##### **1. Manfaat teoretis**

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya didalam bidang hukum kepailitan dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembagian harta pailit terhadap kedudukan hukum kreditor preferen dan kreditor separatis dalam hal pelunasan piutang debitor pailit apabila ternyata harta debitor pailit tidak cukup.

##### **2. Secara praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, saran ataupun informasi yang berguna khususnya bagi para kreditor dan para pihak dalam berperkara di pengadilan niaga dalam hal penyelesaian permasalahan pemberesan harta pailit.

#### **E.Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran pada kepustakaan, khususnya di lingkungan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tidak ditemukan kesamaan judul akan tetapi dalam media elektronik ditemukan kesamaan judul akan tetapi pokok permasalahan yang dianalisis berbeda diantaranya :

1. Nama Herlina Sihombing, Nim 047011029 Program Studi Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Judul Tesis Kedudukan Kreditor Separatis Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan Dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan Perumusan masalah :

a. Bagaimanakah pengaruh kepailitan terhadap objek Hak Tanggungan dalam praktek pelaksanaan eksekusi?

b. Bagaimana Undang-undang Kepailitan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelunasan piutang kreditor separatis yang dijamin dengan Hak Tanggungan dari Debitur yang dinyatakan pailit?

2. Nama Nur Elfira Nirmala Pohan, Nim 147011025, Program Studi Magister Kenotariatan, Judul Analisis Hukum Atas Kedudukan Kreditur Lain Dalam Upaya Hukum Kasasi Pada Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Tiga Putusan Mahkamah Agung), Perumusan masalah :

a. Bagaimana upaya hukum dalam perkara kepailitan?

b. Bagaimana kedudukan kreditur lain dalam mengajukan upaya hukum pada perkara kepailitan ?

c. Bagaimana putusan Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi yang diajukan kreditur lain pada perkara kepailitan?

3. Nama Zulfikar, Nim 077011075, Program Studi Program Magister Kenotariatan, Judul tesis Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Para Kreditor Dalam Hukum Kepailitan, Perumusan masalah :

a. Bagaimana golongan kreditor dalam hukum kepailitan ?

- b. Bagaimana kedudukan para kreditor dalam hukum kepailitan?
- c. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap para kreditor dalam hukum kepailitan ?

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi,<sup>16</sup> dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>17</sup> Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>18</sup>

Bagi suatu penelitian, teori dan kerangka teori mempunyai kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal hal sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam fakta;
- b. teori sangat berguna di dalam klasifikasi fakta;
- c. teori merupakan ikhtiar dari hal-hal yang diuji kebenarannya.

---

<sup>16</sup> J.J.J M Wuisman, dengan penyunting M. Hisman. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid 1 (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 203.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 216.

<sup>18</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 80.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal.121.

Menjawab permasalahan diperlukan landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah menggunakan kesatuan dari penerapan teori Keadilan dan Kemanfaatan.

Menurut Plato, semua orang harus memiliki sifat adil atau keadilan dalam diri mereka, keadilan paling kecil bisa diwujudkan dalam keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi diri sendiri.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja juga digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma “adil” dengan kata lain dari “benar”.<sup>21</sup>

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsuilititeit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>22</sup> Dalam bukunya *Inleiding Tot DE Studie Van Het Nederlandse Recht*, Apeldoorn mengatakan bahwa :

“Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk menciptakan kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama yang lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya”

---

<sup>20</sup> Pieter Mahmud Marzuki(a), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2009), hal.158.

<sup>21</sup> Diterjemahkan dari karya Hans Kelsen, *introduction to problem legal theory* (Clarendon Press-oxford, 1996) dalam buku L. Stanly L. Poulson, *Pengantar Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hal. 48.

<sup>22</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hal. 85.

Berkaitan dengan rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga dalam penelitian tesis ini keadilan hukum semata-mata dipenuhi untuk menciptakan dan memberikan pemenuhan hak bagi para kreditor saat debitor diputus pailit oleh pengadilan. Serangkaian prosedur sejak saat seorang debitor diputus pailit oleh pengadilan sampai dengan memasuki proses pemberesan harta pailit di pengadilan merupakan rangkaian aturan tata tertib yang ditentukan sesuai dengan Undang-undang Kepailitan.

Demikian halnya juga dengan kedudukan dari masing-masing pihak terutama kreditor preferen dan kreditor separatis. Sebagaimana diketahui Kepailitan merupakan lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan bendabenda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Dalam suatu tindakan Pailit suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata Parte*"<sup>23</sup>

Artinya segala proses pengurusan dari awal sampai dengan selesai para pihak baik kurator, hakim pengawas, debitor, kreditor terjalin dalam satu lingkaran penyelesaian kepailitan yang melalui tahapan dan pedoman dasar hukum yang harus dipenuhi dengan demikian segala upaya para pihak dalam hal ini merupakan upaya hukum untuk mencapai keadilan.

Pembagian harta pailit dalam terhadap kedudukan para kreditor dalam hal ini juga dapat dipahami dari sisi keadilan distributif dari Aristoteles dimana keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasanya masing-masing atau menurut haknya masing-masing. Disini keadilan tidak menuntut pembagian yang sama untuk setiap orang, tetapi berdasarkan perbandingan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Jerry Hoff, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, (Jakarta: P.T. Tatanusa, 2000), hal 13.

<sup>24</sup> Komisi Kateketik Keuskupan Agung Semarang, *Mewujudkan Hidup Beriman dalam Masyarakat dan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 37.

## 2. Konsepsi

Konsepsi adalah suatu bagian penting dari teori. Peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatu abstraksi yang di generalisasikan dari hal hal yang khusus yang disebut dengan definisi operasional.<sup>25</sup>

Kerangka konsepsi merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan membuat definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan definisi bertitik tolak pada referensi. Berikut ini diuraikan beberapa konsep/definisi/pengertian yang dijumpai dalam tesis ini yaitu:

- a. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan<sup>26</sup>
- b. Kreditor Preferen adalah kreditor yang dalam hal sifat piutangnya oleh undang undang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya.<sup>27</sup>
- c. Kreditor Separatis adalah berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya dimana ia

---

<sup>25</sup> Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 3.

<sup>26</sup> Undang Undang No 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 angka 2

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 103.

dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya.<sup>28</sup>

- d. Harta Pailit adalah harta kekayaan dari debitur pailit dan bukan milik pribadinya.<sup>29</sup>
- e. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas<sup>30</sup>
- f. Debitor pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.<sup>31</sup>
- g. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas<sup>32</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>33</sup> seperti peraturan perundang-

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 105.

<sup>29</sup> Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hal. 92.

<sup>30</sup> Undang Undang No 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 angka 1

<sup>31</sup> Undang Undang No 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 angka 3

<sup>32</sup> Undang Undang No 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 angka 5

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 13-14.



undangan tentang hukum jaminan, hukum perpajakan serta kepailitan dan putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan kedudukan kreditor preferen dan sekunder dalam upaya menuntut haknya di pengadilan niaga melalui renvoi prosedur.

Oleh karena itu dalam penelitian dan penyusunan tesis ini akan menganalisis kedudukan kreditor pajak selaku kreditor preferen dan kreditor separatis pemegang jaminan hak kebendaan serta beberapa dasar hukum seperti Undang-Undang Perpajakan yang mengatur mengenai kedudukan utang pajak yang harus didahulukan dan penggunaan penerapan asas dalam kepailitan dalam menyelesaikan proses perkara pailit pasca debitur diputus pailit dan harta tidak cukup.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Analitis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurai dan menafsirkan fakta fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2009) , hal. 105.

### 3.Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa data sekunder yaitu bahan pustaka yang diperoleh melalui studi dokumen:<sup>35</sup>

a. Bahan Hukum Primer ,yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan ,yang antara lain dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- 2) Undang undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Undang Undang No 16 tahun 2009 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan
- 4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 6) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda benda yang berkaitan dengan Tanah
- 7) Putusan Nomor 57/PDT.SUS RENVOI PROSEDUR/2011/PN.NIAGA JKT.PST

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal-jurnal;
- 3) Majalah-majalah;
- 4) Artikel-artikel media;
- 5) Dan berbagai tulisan lainnya.

---

<sup>35</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta : Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS, 2005), hal. 6

- a. Bahan Hukum Tersier atau bahan non hukum, yaitu berupa kamus, ensiklopedia dan lain lain.<sup>36</sup>

#### 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan serta membaca, mempelajari dan menganalisis bahan kepustakaan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.<sup>37</sup> Sehingga pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah pustaka (*library research*) melalui alat pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan tentang kepailitan serta Putusan Pengadilan Negara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt Pst yang terkait dengan pembagian harta pailit bila tidak mencukupi.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurai data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan data.<sup>38</sup> Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya adalah kegiatan untuk menganalisa bahan-bahan hukum tertulis dengan menafsirkan isi dari bahan-bahan hukum, kemudian mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

---

<sup>36</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta :Pustaka Pelajar) hal. 156-159.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, 39.

<sup>38</sup> Lexi J Maleonf, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,1993), hal . 103.

Sistematikasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif, maksudnya bahwa hasil analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Kemudian dilakukan dengan penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum atau teori menuju pada hal hal yang khusus atau kenyataan<sup>39</sup>, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dengan diawali dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>39</sup>Pupu Saeful Rahmat," *Jurnal Penelitian Kualitatif*', Equilibrium vol.5 no.9 diakese dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf> pada tanggal 09 April 2017.

## BAB II

### PROSES PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT PASCA PUTUSAN PAILIT

#### A. Tinjauan Kepailitan Secara Umum.

Pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan tahapan yang paling menentukan dalam rangka memenuhi kewajiban debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan suatu putusan pernyataan pailit. Kegiatan ini dilakukan oleh kurator dan dibawah pengawasan hakim pengawas dengan bantuan panitia kreditor serta debitur pailit. Undang-Undang Kepailitan mengatur secara khusus dengan bagian tersendiri aturan pelaksanaan kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang berada dibawah pengawasan hakim pengawas yaitu pada Bab Ketiga Pasal 65-206.<sup>40</sup>

##### 1. Pengertian dan syarat Kepailitan

Menurut Balck Hendry Campbell dan Abdurrachman A yang dikutip dari Munir Fuady arti orisinil dari bankrut atau pailit:<sup>41</sup>

- a. adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.
- b. adalah seorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.

Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitor

---

<sup>40</sup> Rilda Murniati, *Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya*, (Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No 1 Januari-April Fakultas Universitas Lampung: 2011), hal. 106.

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) hal. 6-7.

agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor.<sup>42</sup>

Menurut M. Hadi Shubhan pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dan usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh hutang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kredit.<sup>43</sup>

Sedangkan Menurut Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 angka 1). Pengaturan mengenai kepailitan pada dasarnya ditemukan pada Bab I, II, III dan IV KUH Perdata dan Buku I KUH Dagang. Diawali dengan pertanyaan siapa yang dapat dinyatakan pailit. Apa sajakah yang dapat

---

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 8.

<sup>43</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma Dan Praktik Di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 1.

dijadikan jaminan dan transaksi yang bagaimana yang terjamin. Ketiga hal utama tersebut merupakan konsep dasar menuju pada proses pernyataan dan keputusan pailit. Konsep dasar tersebut kemudian secara jelas diatur dengan lebih rinci pada ketentuan kepailitan.<sup>44</sup>

Syarat kepailitan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja<sup>45</sup>

## 2. Subjek dalam Kepailitan.

### a. Debitor Pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke Pengadilan yang berwenang dapat mengajukan untuk kepentingan debitor

---

<sup>44</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999), hal. 22.

<sup>45</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Junto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 256.

sendiri. Seorang debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, dan
2. debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

b. Hakim Niaga.

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak diperbolehkan hakim tunggal) baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi, hanya untuk perkara niaga lainnya yang tidak merupakan perkara kepailitan diperbolehkan diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Undang-undang No. 4 Tahun 1998, hakim majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yakni hakim-hakim Pengadilan Negeri yang diangkat menjadi hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Di samping itu, juga *hakim ad hoc* yang diangkat dari kalangan para ahli dengan keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.<sup>46</sup>

c. Hakim pengawas.

Untuk mengawasi pemberesan harta pailit dalam keputusan kepailitan oleh pengadilan harus diangkat oleh Hakim Pengawas disamping pengangkatan kurator. Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping

---

<sup>46</sup> Munir Fuady., *Op.Cit.*, hal. 36.



pengangkatan kuratornya. Dahulu, untuk hakim pengawas ini disebut dengan “Hakim Komisaris.”<sup>47</sup>

d. Kurator.

Pasal 15 ayat (1) UUKPKPU yang menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan, yang dapat bertindak selaku kurator selain Balai Harta peninggalan (BHP) adalah orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai Pasal 1 ayat (5), Pasal 70 ayat (1) dan (2).

3. Asas-asas dalam Hukum Kepailitan.

Penjelasan umum UUKPKPU disebutkan bahwa Undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas, asas tersebut antara lain adalah:

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 36-37.

b. Asas Kelangsungan Usaha.

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan.

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi.

Asas Integrasi dalam UUK dan PKPU tersebut mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata Nasional. UUK dan PKPU yang baru mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

#### 4. Tujuan dan Fungsi Kepailitan.

Tujuan pada umumnya adalah memberikan suatu solusi dan dalam kaitannya dengan kepailitan tentunya adalah memberikan solusi bagi para pihak bila debitur dalam keadaan untuk berhenti membayar. Oleh sebab itu kepailitan hadir untuk mencegah timbulnya posisi yang tidak adil bagi seluruh pihak yaitu menghindari dari eksekusi sewenang-wenang oleh kreditor dan mencegah kecurangan oleh debitur.

Tujuan utama dari hukum kepailitan adalah<sup>48</sup>

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para kreditornya.
- b. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tujuan kepailitan antara lain:<sup>49</sup>

- a. Melindungi para Kreditor konkruen untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas hukum jaminan, bahwa “semua harta kekayaan Debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan Debitur”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Menurut Hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUHPerdara. Hukum Kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya UUK dan PKPU, maka akan terjadi Kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada Kreditor yang lemah.
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari-passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditor konkruen atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing

---

<sup>48</sup> Sutan Remy, *Op.Cit.*, hal. 38.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal, 38-40.

Kreditor tersebut). Di dalam Hukum Indonesia, asas *pari-passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUHPerdara.

- c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit tersebut status hukum dari harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.
- d. Pada Hukum Kepailitan Amerika Serikat, memberikan perlindungan hukum terhadap debitor yang beritikad baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum Kepailitan Amerika Serikat, seorang debitor perorangan (individual debtor) akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesai tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun setelah dijual atau dilikuidasi oleh pihak likuiditor, nilai harta kekayaannya tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya kepada para kreditornya. Namun kepada debitor tetap diberikan kesempatan untuk memperoleh *financial fresh start*. debitor tersebut dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang-utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit. Sementara untuk debitor yang berbadan hukum, *financial fresh start* tidak dapat diberikan dan jalan keluar yang diberikan untuk perusahaan yang pailit tersebut adalah setelah membubarkan perusahaan debitor yang pailit tersebut setelah likuidasi berakhir. Sedangkan menurut UUK dan PKPU *financial fresh start* baik untuk debitor perorangan maupun debitor badan hukum perusahaan tidak dapat diberikan setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likudasi terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh Kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi debitor tetap pula berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang belum lunas.
- e. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pihak pengadilan.
- f. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor. Untuk ketentuan hal tersebut, inilah yang biasa disebut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdapat dalam UUK dan PKPU di dalam Hukum Kepailitan Indonesia.

Menurut Mosgan Situmorang tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kreditor.<sup>50</sup> Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagi kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak Kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar Debitor membayar utangnya.<sup>51</sup> Adanya lembaga kepailitan memungkinkan Debitor membayar utangutangnya itu secara tenang, tertib, dan adil, yaitu:<sup>52</sup>

1. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari Debitor;
2. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian Kreditor yang telah diperiksa sebagai Kreditor yang sah, masing-masing sesuai dengan hak preferensinya; proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan Kreditor konkuren lainnya

## **B. Proses Pengurusan Harta Pailit.**

Dalam proses pengurusan harta pailit terlebih dahulu yang perlu diketahui adalah akibat hukum dari putusan pailit terhadap subjek hukum yang dinyatakan pailit. Adapun subjek hukum dalam kepailitan yaitu pemohon pailit, debitor pailit, hakim pengawas, kurator dan kreditor.

---

<sup>50</sup> Mosgan Situmorang, *Tinjauan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang* (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 1999), hal. 163.

<sup>51</sup> Rudhi Prasetya, *Likuidasi Sukarela dalam Hukum Kepailitan*, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996, hal. 1 – 3.

<sup>52</sup> *Ibid.*

Mengenai subjek pemohon pernyataan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan Umum.
- c. Dalam hal Debitor adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- d. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- e. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan

Dalam hal ini Akibat yang terpenting dari pernyataan pailit adalah bahwa Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya. Ia tidak boleh lagi melakukan pengeluaran uang dengan sekehendaknya sendiri dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan para Kreditor, ia dapat dituntut pidana.<sup>53</sup> Pihak yang dimohonkan pailit dalam hal ini dapat perorangan, perusahaan bukan badan hukum dan perusahaan berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas. Apabila hakim pengadilan niaga telah memutus perkara pailit maka secara otomatis juga putusan tersebut merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian secara otomatis kurator

---

<sup>53</sup> E Suherman, *Kefailitan*, (Bandung: Binacipta, 1988), hal. 17.

didampingi oleh hakim pengawas akan melaksanakan tugasnya dalam mengurus dan membereskan harta pailit.

Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (*public attachment, gerechtelijk beslag*) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana didefenisikan dalam undang-undang mengenai arti kepailitan. Dalam Pasal 21 Undang-undang Kepailitan dikatakan bahwa “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”<sup>54</sup>

Perihal apa yang dimaksudkan dengan kekayaan tersebut, Kartono dalam bukunya “Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” halaman 39 menyebutkan : “Kekayaan terdiri tidak hanya dari harta benda yang bertubuh seperti barang-barang tak bergerak dan barang-barang bergerak saja, melainkan juga tuntutan-tuntutan hukum (utang-piutang misalnya).”<sup>55</sup>

Dalam pengurusan harta kekayaan debitor pasca dinyatakan pailit maka dalam hal ini menjadi tugas utama kurator untuk mengurus harta pailit debitor.

#### 1. Tugas dan kewenangan kurator dalam pengurusan harta pailit.

Kurator merupakan lembaga yang sangat penting keberadaannya dalam kepailitan. Dalam Kepailitan, Kurator adalah orang yang memiliki keahlian khusus untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit dengan tujuan untuk melakukan pembagian harta kekayaan debitor

---

<sup>54</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 163.

<sup>55</sup> Kartono, *Kepailitan dan Penundaan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hal. 39.

kepada para kreditornya dengan prosedur serta tata cara tertentu.<sup>56</sup> Vollmar menyatakan bahwa “*De kurator is belast, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel*” (kurator adalah bertugas, menurut Undang-undang, mengurus dan membereskan harta pailit).<sup>57</sup>

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.<sup>58</sup> Setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, debitor pailit tersebut demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan/ atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas. Dari proporsi ini , maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit. Karena itu, undang-undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan kurator.<sup>59</sup>

Menurut Pasal 66 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang intinya sama dengan ketentuan 64 *Failissementsverordening*.

---

<sup>56</sup> Yuhelson, *Tugas Dan Kewenangan Kurator Dalam Proses Kepailitan*, (Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI, 2006), hal. 2

<sup>57</sup> Dikutip dalam Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008) hal 108.

<sup>58</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hal. 108.

<sup>59</sup> *Ibid.*



Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu keputusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, sedangkan Kurator menurut ketentuan Pasal 70 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator yang dimaksud adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya, yang dapat menjadi kurator adalah:

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit; dan
- b. telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 70 Ayat (2) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).

Tugas-tugas Kurator dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit, antara lain :

- a. Memuat pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia.<sup>60</sup>
- b. Mengamankan harta pailit.<sup>61</sup>
- c. Mengadakan rapat-rapat Kreditor seperti : Rapat kreditor
- d. Rapat Verifikasi, Rapat Pembahasan Perdamaian dan Rapat-Rapat lain yang dibutuhkan dalam proses kepailitan.
- e. Menghadapi segala tuntutan terhadap harta pailit<sup>62</sup>
- f. Menerima pendaftaran tagihan dari para kreditor<sup>63</sup>
- g. Menyusun daftar kreditor<sup>64</sup>
- h. Melakukan sidang perselisihan apabila terdapat perselisihan mengenai status dan jumlah tagihan kreditor<sup>65</sup>
- i. Menyusun daftar Inventaris harta pailit<sup>66</sup>

---

<sup>60</sup> Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

<sup>61</sup> Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

<sup>62</sup> Pasal 26 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

<sup>63</sup> Pasal 27 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

<sup>64</sup> Pasal 117 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

<sup>65</sup> Pasal 127 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

- j. Melakukan Rapat pembahasan rencana perdamaian, apabila debitor pailit mengajukan rencana perdamaian.<sup>67</sup>
- k. Membuat Laporan kepada Hakim Pengawas.<sup>68</sup>
- l. Melakukan pengakhiran Kepailitan dan Rehabilitasi.<sup>69</sup>

Kurator dalam menjalankan tugas bersifat independen dengan pihak Debitor dan Kreditor, tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau Kreditor.<sup>70</sup> Tugas Kurator secara rinci antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengumumkan putusan pernyataan pailit, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor dalam Berita Negara R.I dan dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima (Pasal 15 ayat (4) UUK) dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai iktisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut :<sup>71</sup>

- 1) nama, alamat dan pekerjaan debitor;
- 2) nama hakim pengawas;
- 3) nama, alamat dan pekerjaan kurator;
- 4) nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- 5) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.

---

<sup>66</sup> Pasal 100 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

<sup>67</sup> Pasal 146-Pasal 148 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

<sup>68</sup> Pasal 74 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

<sup>69</sup> Pasal 115-Pasal 221 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

<sup>70</sup> Munir Fuadi., *Op.Cit.*, hal. 44.

<sup>71</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 112

- b. Mengusahakan keselamatan harta pailit dengan melakukan penyimpanan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda penerimaan (Pasal 98 UUK);
- c. Membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator (Pasal 100 UUK), dan setelah itu harus membuat daftar tentang sifat dan jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal para kreditor beserta jumlah piutang mereka masing-masing (Pasal 102 UUK). Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (Pasal 103 UUK);
- d. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian batas akhir pengajuan tagihan Kreditor, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat pencocokan piutang, yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 114 UUK);
- e. Mencocokkan tagihan-tagihan yang masuk (Pasal 116 UUK);
- f. Membuat daftar piutang yang sementara diakui dan yang dibantah (Pasal 117 UUK);
- g. Menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah (Pasal 119 UUK);

- h. Memberitahukan kepada para Kreditor tentang adanya daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah, serta memanggil untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang (Pasal 120 UUK);
- i. Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, setelah rapat pencocokan piutang berakhir (Pasal 143 ayat (1) UUK);
- j. Memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian (Pasal 146 UUK);
- k. Membuat/menyusun daftar pembagian dan dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 189 ayat (1) UUK) dan menempatkan daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh para Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas (Pasal 192 UUK);
- l. Melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan (Pasal 201 UUK);
- m. Mengumumkan ikhtisar berakhirnya kepailitan dalam surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara (Pasal 202 ayat (2) UUK);
- n. Memberikan pertanggung jawaban mengenai tugas pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas (Pasal 202 ayat (3) UUK).

## 2. Proses pengurusan harta pailit.

Kewenangan Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit

dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UUK).

Adapun dasar hukum pengaturan mengenai pengurusan dan pemberesan pembagian harta pailit dapat dilihat dari definisi kurator. Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan kurator adalah “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.” Dalam hal ini langkah yang dilakukan kurator dalam proses pengurusan harta pailit adalah dilakukan pengumuman dan rapat kreditor, melanjutkan usaha (*On Going Concern*), rapat verifikasi (pencocokan piutang), perdamaian. Sedangkan apabila tidak ada perdamaian maka akan langsung dilaksanakan tahap pemberesan.<sup>72</sup>

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku

---

<sup>72</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Medan : Usu Press, 2009), hal. 135.

saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.<sup>73</sup>

Adapun langkah pertama yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan atau kurator adalah dengan melakukan pengurusan harta pailit dengan mengumumkan kepailitan debitor pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia sekurang kurangnya 2 harian surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Kepailitan diumumkan untuk diketahui kreditornya. Untuk pengajuan tagihan serta verifikasi utang maka pentingnya kreditor mengetahui kepailitan debitor karena tanpa adanya pengajuan tagihan dan proses verifikasi utang tersebut dapat dipastikan kreditor tidak tercatat sebagai kreditor pailit. Pengumuman lalu diumumkan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) sejak putusan pailit ditetapkan.<sup>74</sup> Hakim pengawas dalam hal ini wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada kurator. Kemudian kurator wajib memberitahukan mengenai rapat kreditor pertama dengan surat tercatat atau melalui kurir selambat lambatnya 5 hari sejak putusan pailit ditetapkan.<sup>75</sup>

Pada hari yang ditentukan akan diadakan rapat verifikasi (pencocokan utang-piutang). Dalam rapat verifikasi ini akan ditentukan pertimbangan dan urutan hukum dari masing-masing kreditor. Rapat

---

<sup>73</sup> Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 62.

<sup>74</sup> Rilda Murniati, *Jurnal Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011), hal. 107.

<sup>75</sup> *Ibid.*

verifikasi dalam hal ini dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokkan utang utang debitor pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan tagihan yang masuk terhadap harta pailit, untuk merinci tentang berapa besarnya piutang piutang yang dapat dibayarkan kepada masing masing kreditor yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang yang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah, yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak hak dari masing masing kreditor.<sup>76</sup>

Hal hal penting sehubungan dengan rapat verifikasi adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Pemberitahuan kepada kreditor tentang batas akhir pengajuan piutang pada
2. saat rapat verifikasi.
3. Pengajuan piutang dengan bukti tertulis.
4. Pengujian kebenaran piutang
5. Pembuatan daftar piutang
6. Pemberitahuan adanya daftar piutang
7. Pengajuan piutang paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat verifikasi dan tidak ada keberatan dalam rapat verifikasi, kecuali jika debitor diluar wilayah Indonesia, seperti yang diatur dalam pasal 133 Undang undang Kepailitan.

Rapat yang telah selesai maka Balai Harta Peninggalan akan membuat daftar utang dan piutang harta pailit lengkap dengan nama dan tempat tinggalnya, beserta jumlah utang dan piutang tersebut masing masing. Balai Harta Peninggalan dalam hal ini selaku kurator memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit dengan memberikan keterangan kepada kreditor tentang apa yang mereka pandang perlu. Berita acara

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Moch Fasluqi Ikhsanuddin, *Skripsi berjudul Utang Pajak Sebagai dasar Permohonan Pailit*, (Surabaya : Universitas Erlangga, 2016), hal. 56.

rapat verifikasi piutang harus ditempatkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga dan salinannya diletakkan di Kantor Balai Harta Peninggalan agar dapat dilihat dan dibaca secara cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan.<sup>78</sup>

Debitor telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga namun bagi debitor pailit tersebut diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya. Perdamaian pada perkara kepailitan terjadi dalam proses perkara kepailitan melalui hakim pengawas. Perdamaian dalam kepailitan lebih mengarah pada proses penyelesaian utang-utang debitor melalui pemberesan harta pailit.<sup>79</sup> Pengertian/definisi perdamaian/akor menurut Vollmar adalah semua perjanjian antara Debitor dengan semua Kreditornya, dimana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, yang biasanya berupa suatu pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar suatu persentase si Debitor dibebaskan untuk sisanya.<sup>80</sup>

Jika dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian dan disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau sementara diakui, kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi, dan putusan pengesahan perdamaian tersebut telah memperoleh kekuatan

---

<sup>78</sup> Rilda Murniati., *Op.Cit.* hal. 109.

<sup>79</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 140-143.

<sup>80</sup> H.F.A. Vollmar, *De Faillissementswet*, cetakan IV, 1953, hal. 236



hukum tetap. Homologasi perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti membawa akibat berakhirnya kepailitan Debitor (Pasal 166 ayat (1) UUK).

Terhadap rencana perdamaian yang dihomologasi akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

1. kepailitan dinyatakan berakhir;
2. keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren;
3. perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan
4. perdamaian tidak boleh diajukan dua kali;
5. perdamaian merupakan alasan hak bagi garantor;
6. hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap garantor dan rekan debitor;
7. hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga;
8. penangguhan eksekusi jaminan utang berakhir;
9. *actio paulina* berakhir;
10. si pailit dapat direhabilitasi.<sup>81</sup>

### **C. Proses Pemberesan Harta Pailit.**

Pemberesan harta pailit merupakan kegiatan penjualan atau menguangkan harta kekayaan debitor pailit. Pemberesan merupakan tugas utama dari kurator sebagai pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit hal ini sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>82</sup>

1. Tugas kurator dalam pemberesan harta debitor pailit.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut kurator memiliki kewenangan .<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 140-143.

<sup>82</sup> Nindyo Pramono, *Op.Cit.*, hal. 119.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 119.

- a. membatalkan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang dilakukan sebelum kepailitan yang dapat merugikan para kreditornya.
- b. memilih cara terbaik dalam melakukan pemberesan, harus dilakukan dengan penjualan di muka umum ataukah dengan penjualan dibawah tangan dengan berbagai cara mekanisme penjualan
- c. melanjutkan usaha debitur

Sebelum dilakukan pembayaran, kurator mempunyai tugas harus membuat daftar bagian pembayaran untuk dimintakan pengesahan kepada hakim pengawas. Daftar bagian tersebut berisi:<sup>84</sup>

- a. Pertelaan tentang penerimaan dan pengeluaran (didalamnya termasuk upah kurator).
  - b. Nama para kreditor.
  - c. Jumlah pencocokan tiap piutang.
  - d. Pembagian yang harus diterima oleh setiap piutang tersebut.
2. Proses pemberesan harta pailit.

Apabila upaya perdamaian tidak ada dalam proses kepailitan yang disebabkan karena debitor pailit tidak menawarkan perdamaian, debitor pailit menawarkan perdamaian tetapi ditolak oleh para kreditor, atau debitor pailit menawarkan perdamaian kemudian disetujui oleh para kreditor akan tetapi ditolak oleh hakim Pengadilan Niaga maka proses selanjutnya adalah tahap insolvensi.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 120.

Insolvensi (*insolvency*) dalam kamus bahasa Inggris berarti: ketidakmampuan membayar utang. Pengertian insolvensi (*insolvency*) menurut Fridmen, Jack P dalam Munir Fuady adalah<sup>85</sup>

1. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban financial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau
2. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Undang-Undang Kepailitan mengatur insolvensi dalam Pasal 178 ayat (1) sebagai berikut:

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.”

Akibat hukum insolvensi antara lain adalah harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misalnya pertimbangan bisnis). Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit (Pasal 184 ayat (1) UUK).

Insolvensi dalam tahap pemberesan kepailitan adalah suatu tahap dimana akan terjadi jika tidak terjadi suatu perdamaian sampai dihomologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit. Konsekuensi yuridis dari insolven debitor pailit adalah harta

---

<sup>85</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 135.

pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit dimuka umum atau dibawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas, demikian juga dengan hakim pengawas dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara pemberesan.<sup>86</sup> tahap pemberesan harta pailit menurut pasal 16 ayat 1 Undang-undang Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut :<sup>87</sup>

a. Mengusulkan serta melaksanakan penjualan harta pailit.

Beberapa alasan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailitan dalam hal Kurator menjual aset Debitor pailit:

1. Untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 107 ayat (1) UUK);
2. Penahanan barang mengakibatkan kerugian (Pasal 107 ayat (1) UUK);
3. Untuk kelangsungan usaha Debitor (Pasal 56 ayat (3) UUK);
4. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan Debitor (Pasal 184 ayat (2) UUK);
5. Dalam rangka pemberesan (Pasal 184 ayat (1)UUK).

Dalam menjual aset debitor kurator harus mengusulkan penjualan harta pailit tersebut kepada debitor. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor, apabila:

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 144.

<sup>87</sup> Sunarmi, *Op.Cit.* hal.140.

1. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
2. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan (Pasal 184 Undang-undang Kepailitan dan PKPU).

Dalam rangka membiayai tindakan-tindakan pengurusan dan pemberesan termasuk jasa kurator diperlukan dana, dan dana tersebut diperoleh dari hasil penjualan harta kekayaan pailit, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak. Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bila penjualan dimuka umum tidak tercapai, maka dapat dilakukan penjualan dibawah tangan dengan izin hakim pengawas (Pasal 185 Undang-undang Kepailitan dan PKPU).

b. Membuat daftar pembagian

Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua aset/harta pailit, setelah terkumpul cukup uang tunai dari hasil penjualan harta pailit kemudian dikurangi biaya-biaya kepailitan dan sisanya untuk membyar utang Debitor pailit kepada para Kreditor. Proses pembayaran utang Debitor pailit kepada Kreditor adalah sebagai berikut:

1. Kurator membuat daftar pembagian (Pasal 189 ayat (1) UUK). Daftar tersebut memuat: (Pasal 189 ayat (2) UUK) dengan rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator; Nama Kreditor;

Jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang; Bagian yang wajib diterima kepada Kreditor.

2. Daftar pembagian dimintakan persetujuan kepada hakim Pengawas Pasal 189 ayat (1) UUK).
3. Daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (1) UUK).
4. Penyediaan daftar pembagian di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan tenggang waktu bagi Kreditor untuk melihat daftar tersebut oleh Kurator diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar yang ditunjuk Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (2) UUK).
5. Selama tenggang waktu tersebut Kreditor dapat mengajukan perlawanan dengan cara mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 193 ayat (1) UUK).
6. Pengadilan Niaga paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tenggang waktu tersebut berakhir harus memberikan putusan disertai pertimbangan hukumnya (Pasal 194 ayat (6) UUK). Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan kasasi oleh Kurator atau setiap Kreditor (Pasal 196 ayat (1) UUK).
7. Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan diucapkan, maka pembayaran utang debitor pailit kepada

Kreditor segera dilakukan oleh Kurator sesuai daftar pembagian yang telah ditetapkan (Pasal 201 UUK).

Kepailitan berakhir setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan dibayar jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup mengikat (Pasal 202 ayat (1) UUK). Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu, dalam hal sesudah pembagian penutup ada pembagian yang tadinya dicadangkan bagi Kreditor yang hak untuk didahulukan dibantah karena belum ada putusan mengenai hak untuk didahulukan, jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui (Pasal 203 UUK).

### BAB III

## PEMBAGIAN HARTA PAILIT TERHADAP KEDUDUKAN KREDITOR PREFEREN DAN KREDITOR SEPARATIS BILA HARTA YANG DIBAGI TIDAK CUKUP

### A. Asas Yang Dianut Dalam Pembagian Harta Pailit.

Mengkaji persoalan tersebut diatas maka dapat dikaji dari penerapan asas proporsioanalitas dalam kepailitan. Dalam praktik penerapan di pengadilan niaga proporsioanalitas lebih sering diartikan sebagai pembagian yang adil dan seimbang, keadilan dan keseimbangan yang menciptakan proporsionalitas. Dalam pembagian piutang pailit terdapat tingkatan prefensi masing-masing kreditor untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, saling berebut dan ketidakadilan bagi masing-masing kreditor saat kepailitan terjadi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan prinsip *debt pooling*. Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang menganut bagaimana kekayaan harta pailit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan memegang prinsip *pari spassu prorata parte* dan prinsip *creditorium*.<sup>88</sup>

Prinsip Proporsionalitas diartikan juga dengan Prinsip *pari passu pro rata parte* yang memiliki arti yang sama yakni pada dasarnya membagi secara proporsionalitas. Menurut Hadi Shubhan mengemukakan bahwa “prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara

---

<sup>88</sup> Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hal. 41.



proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut Undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan”.<sup>89</sup>

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan secara implisit maksud dari prinsip *pari passu pro rata parte* bahwa “prinsip tersebut telah dikenal dalam hukum kepailitan yang berkembang di zaman Romawi”. Lahirnya prinsip *pari passu pro rata parte* awalnya berasal dari adagium “*mission in bona*” yang artinya bahwa harta kekayaan debitor dapat dijual untuk melunasi utang kepada kreditornya. Dari hasil penjualan harta kekayaan tersebut debitor akan melunasi utang-utangnya itu secara proporsional sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditor.<sup>90</sup>

Prinsip *pari passu pro rata parte* dan *paritas creditorium* didasari pada ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Prinsip *pari passu pro rata parte* dan *paritas creditorium* menekankan pada dasarnya pelunasan piutang atas hasil eksekusi bagi para kreditor dilaksanakan secara seimbang.<sup>91</sup> Namun demikian prinsip *paritas creditorium* masih dirasa tidak adil, hal ini dapat dilihat bahwa para

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hal.29.

<sup>90</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal.11.

<sup>91</sup> J.Andy Hartanto *Op.Cit*. hal. 121.

kreditor berkedudukan sama antara satu kreditor dengan kreditor lainnya. Prinsip *paritas creditorium* tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor baik itu kreditor yang memiliki piutang besar maupun kreditor yang memiliki piutang kecil, baik kreditor yang memegang jaminan maupun kreditor yang tidak memegang jaminan.<sup>92</sup> Ditambah lagi Prinsip *paritas creditorium* mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan perundang-undangan lainnya sehingga asas ini hanya berlaku bagi kreditor saja. Hal ini dikarenakan apabila ini diterapkan maka akan terasa sangat tidak adil bagi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan kreditor preferen lainnya yang posisinya disetarakan sebagai kreditor konkuren dengan mendapat pembagian yang sama rata tanpa ada didahulukan.<sup>93</sup>

Disisi lain apabila prinsip *paritas creditorium* diterapkan pada permasalahan harta pailit tidak cukup untuk dibagi kepada para kreditor maka juga akan menyebabkan ketidakadilan juga sebab prinsip *paritas creditorium* pada dasarnya hanya memandang menjamin pelunasan utang debitor sekalipun pelunasan tersebut nantinya harus menggunakan harta kekayaan debitor itu sendiri. Jaminan ini semata-mata untuk menjamin hak pembayaran utang kreditor, dan Prinsip *paritas creditorium* tidak

---

<sup>92</sup> Bintang Partogi Mangaratua Sibuea, *Prinsip Creditorium Dalam Kepailitan*, artikel hukum Pedia.com diakses dari <http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/prinsip-paritas-creditorium-dalam-kepailitan> pada tanggal 10 Mei 2018

<sup>93</sup> J.Andy Hartanto *Op.Cit.* hal. 121.

membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor baik itu kreditor yang memiliki piutang besar maupun kreditor yang memiliki piutang kecil, baik kreditor yang memegang jaminan maupun kreditor yang tidak memegang jaminan. Apabila prinsip ini diterapkan pada pembagian harta pailit yang tidak cukup tentunya juga tidak akan adil, ketidakadilan justru akan timbul dari pihak kreditor preferen sebab kedudukan preferen harus diutamakan terlebih dahulu, terlebih lagi dalam hukum kepailitan terdapat kreditor separtaris dan konkuren sehingga dengan pembagian harta dibagi sama rata dengan kreditor konkuren tentunya makna status kedudukan dari kreditor preferen akan kabur sebagai kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan.

#### **B. Perbedaan Kedudukan Kreditor Preferen Dan Kreditor Separatis Dalam Hak Memperoleh Harta Pailit**

1. Kedudukan kreditor preferen sebagai kedudukan yang harus didahulukan menurut undang-undang.

Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor preferen terdiri dari kreditor preferen khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara, dan kreditor preferen umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdara.

Didalam Undang-undang Kepailitan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, maka

dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa harus kehilangan hak-hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor termasuk hak-hak dari kreditor tersebut untuk didahulukan pembayarannya.

Sementara itu kedudukan utang pajak merupakan salah satu kategori yang merupakan subjek kreditor preferen. Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menyatakan bahwa kedudukan utang pajak adalah mendahulu dari hak mendahulu lainnya kecuali biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Dalam Pasal 32 Undang Undang KUP yang menyatakan bahwa “dalam menjalankan hak dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib pajak diwakili dalam hal badan dalam pembubaran atau pailit, dalam hal ini kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Bagi wajib pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, oleh karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Penegasan tentang kedudukan utang pajak juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara juga jelas dikatakan Keuangan Negara meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Oleh sebab itu dapat disimpulkan kedudukan Kreditur preferen termasuk dalam golongan *secured creditors* karena semata-mata sifat piutangnya oleh Undang-Undang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya. Kedudukan yang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya tercermin dari salah satunya melalui Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Tentang Keuangan Negara.

Dengan kedudukan istimewa ini, kreditur preferen berada diurutan atas sebelum kreditur konkuren atau *unsecured creditors* lainnya. Utang debitur pada kreditur preferen memang tidak diikat dengan jaminan kebendaan tapi Undang-Undang mendahulukan mereka dalam hal pembayaran.<sup>94</sup>

Hak istimewa mengandung arti hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya.<sup>95</sup> Menelusuri mengenai kedudukan kreditor

---

<sup>94</sup> Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>95</sup> Rocky Marbun, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012), hal. 171.

preferen lebih jauh maka dapat dilihat dalam KUH Perdata. Kedudukan kreditor istimewa berada dibawah pemegang Hak Tanggungan dan Gadai. Pasal 1133 KUH Perdata mengatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari Gadai dan Hipotik, sedangkan menurut Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata, hak istimewa terbagi menjadi *privilege* khusus dan *privilege* umum.<sup>96</sup>

Tingkatan golongan hak istimewa (*privilege*) dengan tingkatan hak prefensinya sebagai berikut.<sup>97</sup>

- a. *Privilege* khusus diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata yaitu kedudukannya dibawah kreditor separatis kecuali untuk *privilege* khusus pada butir 1 yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa “biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lain yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari gadai dan hipotik.
- b. *Privilege* umum diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata dimana kedudukannya adalah sama dengan *Privilege* khusus yaitu dibawah kreditor separatis, kecuali untuk *privilege* umum pada butir 1 yang menyatakan bahwa biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik.

---

<sup>96</sup> J Andy Hartanto, *Op.Cit*, hal. 145

<sup>97</sup> *Ibid*, hal. 125.

Kreditor preferen tidak mempunyai hak untuk memulai prosedur hukum untuk melaksanakan hak mereka, mereka hanya diwajibkan untuk mengajukan tagihan mereka pada kurator untuk dicocokkan sehingga kreditor istimewa dibebani sebagai biaya kepailitan secara *prorata parte*. Ada tiga kategori kreditor yang diistimewakan (kreditor preferen) :<sup>98</sup>

- a. *creditor who have statutory priority*;
- b. *creditor who have non- statutory*; dan
- c. *estate creditors*.

Kreditor istimewa mempunyai prioritas berdasarkan perundang-undangan terdiri dari yang mempunyai prioritas khusus sebagaimana diatur dalam pasal 1139 KUH Perdata dan yang mempunyai prioritas umum sebagaimana diatur dalam pasal 1149 KUH Perdata. Sedangkan kreditor istimewa bukan berdasarkan undang-undang terdiri dari hak untuk menahan barang, penahanan atas *titel (retention of title)*, perjumpaan utang (kompensasi) hak penjualan untuk menuntut kembali barangnya dan hak untuk mengakhiri suatu perjanjian. Sedangkan *estate creditor* adalah kreditor yang mempunyai piutang atas harta pailit (utang harta pailit) seperti upah kurator, biaya pemberesan harta pailit, upah karyawan sejak tanggal pailit.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Jerry Hoff, *Op.Cit.* hal.112.

<sup>99</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.* hal. 145.

2. Kedudukan kreditor separatis sebagai hak yang dijamin dengan objek kebendaan menurut undang-undang.

Pada dasarnya dipailitkan atau tidak sama sekali tidak berpengaruh atas jaminan terpenuhinya piutang kreditor separatis. Hal ini dikarenakan kreditor separatis telah mengikat harta debitur tertentu sebagai objek jaminan jika kreditor menciderai janji (wanprestasi). Dengan jaminan khusus, kreditor separatis mencoba menyelamatkan piutangnya, meskipun harta dari hasil penjualan objek jaminan belum tentu cukup untuk membayar utang utang debitur.<sup>100</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman menyebutkan bahwa sebagai kreditor pemegang hak jaminan yang memiliki hak preferen dan kedudukannya sebagai kreditor separatis. Kreditor separatis dapat menjual dan mengambil sendiri hasil dari penjualan objek jaminan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan atas jaminan utang itu tidak menutupi seluruh utangnya maka kreditor separatis dapat memintakan agar terhadap kekurangan tersebut dia diperhitungkan sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya apabila hasil dari penjualan jaminan utang melebihi utang-utangnya maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada debitor.<sup>101</sup>

Adapun yang termasuk ke dalam kreditor separatis diantaranya adalah pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan jaminan kebendaan lainnya.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Nindyo Pramono dan Sularto, *Op.Cit.*, hal. 87.

<sup>101</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 17.

<sup>102</sup> Nindyo Pramono dan Sularto, *Op.Cit.*



Suatu jaminan utang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan;
- b. Jaminan utang tidak menem-patkan Kreditornya untuk bersengketa;
- c. Harga barang jaminan tersebut mudah dinilai;
- d. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat, atau setidaknya stabil;
- e. Jaminan utang tidak membebankan kewajiban-kewajiban tertentu bagi Kreditor, misalnya kewajiban merawat dan memper-baiki barang, membayar pajak, dan sebagainya;
- f. Ketika pinjaman macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah, dan tidak memerlukan bantuan Debitor. Artinya suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan “mendekati tunai” (*near to cash*).<sup>103</sup>

Jaminan yang memenuhi syarat tersebut adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada Kreditor atau suatu kebendaan milik Debitor hak untuk memanfaatkan benda itu. Benda yang dijaminkan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jaminan kebendaan mempunyai ciri yang berbeda dari jaminan perorangan. Ciri jaminan kebendaan adalah:<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Fuady dalam Sri Redjeki Slamet, Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, *Lex Jurnalica*, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2016 hal. 108.

<sup>104</sup> Hasbullah dalam *Ibid*.

- a. Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda;
- b. Kreditor mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik Debitor;
- c. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun;
- d. Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite/zaaksquegevolg*);
- e. Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada terjadi kemudian (*droit de preference*);
- f. Dapat diperalihkan seperti hipotek; dan
- g. Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*)

Jaminan kebendaan memiliki banyak kelebihan secara hukum, antara lain:<sup>105</sup>

- a. Jaminan utang kebendaan pada prinsipnya memiliki hak prioritas, yakni mendapat prioritas pertama atas hasil eksekusi barang jaminan untuk pembayaran utang terlebih dahulu sebelum utang-utang lain;
- b. Eksekusinya mudah. Eksekusi jaminan utang dengan hak jaminan tidak seperti eksekusi biasa, yang harus menempuh jalur pengadilan melalui proses gugatan biasa yang panjang dan lama. Bahkan dalam hal-hal tertentu, barang objek jaminan utang dapat dieksekusi sendiri (*parate eksekusi*) oleh pemegang jaminan tersebut, tanpa perlu ikut campur tangan pengadilan sama sekali;

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal. 108-109.

- c. Mempunyai prinsip keterbukaan. Suatu jaminan kebendaan harus dilakukan prosedur formal tertentu, yaitu keharusan pembuatan akta dan didaftarkan di hadapan pejabat tertentu; serta penggunaan instrumen ataupun klausul yang baku, sehingga proses pelaksanaan jaminan kebendaan menjadi lebih tertib.
- d. Berlaku prinsip hak kebendaan. Hak jaminan utang tetap eksis, ketangan siapapun benda objek jaminan utang tersebut beralih atau dialihkan.

Jaminan kebendaan yang berlaku saat ini adalah:

- a. Hipotek. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata buku kedua. Saat ini yang berlaku hanya untuk Hipotik kapal, yaitu kapal laut.
- b. Hak Tanggungan. Berobjekkan tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda benda yang berkaitan dengan Tanah.
- c. Gadai. Berobjekkan benda-benda bergerak, dengan dasar hukumnya Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- d. Gadai Tanah. Berobjekan tanah, dengan dasar hukumnya adalah hukum Adat dan dikuatkan oleh UUPA.
- e. Fidusia. Berobjekan benda bergerak (berwujud atau tidak berwujud) dan benda tidak bergerak, khususnya yang tidak dapat dibebani

dengan Hak Tanggungan. Dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pada pasal 56 ayat 1 UUK dan PKPU menyebutkan bahwa setiap kreditor separatis bertanggung jawab terhadap kurator mengenai hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisanya setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya. Sebaliknya seandainya uang hasil penjualan jaminan tersebut tidak cukup memenuhi utang-utang debitur, maka demi terbayarnya sisa utang-utang tersebut, kreditor separatis dapat meminta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian harta pailit tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya.<sup>106</sup>

### **C. Analisis Pembagian Harta Pailit**

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mengenai kedudukan dari kreditor preferen dan kreditor separatis memiliki kedudukan yang memiliki hak masing-masing. Akan tetapi apabila berkaitan dengan pembagian harta pailit kedudukan kreditor preferen memiliki kedudukan yang tetap harus didahulukan dalam pembagian hartanya. Berdasarkan hal tersebut terkadang terdapat kendala dalam hal pembagian harta pailit tersebut. Kendala yang dihadapi diantaranya yang difokuskan dalam penelitian ini ada 2 yakni harta pailit yang hendak dibagi

---

<sup>106</sup> Nindyo Pramono dan Sularto, *Op.Cit.* hal. 87.

tidak mencukupi untuk menutupi piutang dari masing-masing kreditor dan harta pailit yang tidak cukup tersebut tetap hendak dibagi.

#### 1. Harta pailit tidak cukup.

Dalam hal harta pailit tidak cukup, pengadilan bisa mencabut pernyataan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagai contoh kasus bila harta pailit tidak cukup maka melalui kurator dapat memohonkan kepada majelis hakim untuk mengajukan pencabutan pernyataan pailit.

Dalam pengakhiran kepailitan Gunawan Tjandra akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim. Majelis yang diketuai Herdy Agusten melihat ternyata tidak ada aset yang mencukupi untuk membayar utang kepailitan. Aset-aset yang ditemukan kurator, jumlahnya sangat kecil. Karena melihat harta pailit tidak cukup untuk membayar utang, majelis hakim mengabulkan permohonan kurator. Majelis menyatakan mencabut putusan No 74/Pailit/PN.Niaga/Jkt.Pst yang menyatakan Gunawan Tjandra pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan majelis sekaligus memerintahkan Gunawan untuk membayar *fee* kurator sebesar Rp250 juta.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Putusan Pailit Gunawan Tjandra Dicabut dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cc82ed19f548/putusan-pailit-gunawan-tjandra-dicabut> pada tanggal 27 Oktober 2010, diakses pada tanggal 04 Juli 2018.

Menurut Hadi Shubhan dalam proses pemberesan harta tersebut ternyata harta pailit tidak dapat mencukupi untuk melunasi pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditornya, maka :<sup>108</sup>

- a. Jika debitor pailit itu suatu badan hukum , maka demi hukum badan hukum tersebut menjadi bubar. Dengan bubarnya badan hukum tersebut maka utang-utang badan hukum yang belum terbayarkan menjadi utang diatas kertas saja tanpa bisa dilakukan penagihan karena badan hukumnya sudah bubar. Dalam pada itu, badan hukum pailit tidak mencukupi untuk membayar semua utangnya kepada para kreditornya, tidak dapat mengajukan pencabutan kepailitan.
- b. sedangkan jika debitor pailit itu subjek hukum manusia, maka kepailitan tersebut akan dicabut dari pengadilan. Atas dicabutnya status pailit tersebut terhadap debitor pailit ini, maka debitor pailit menjadi subjek hukum yang sempurna tanpa status pailit. Sedangkan sisa utang yang belum terbayarkan masih tetap mengikuti debitor ini, dan bahkan secara teoritis debitor ini masih bisa dimohonkan pailit lagi. Konstruksi hukum semacam ini dikarenakan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal prinsip *debt forgiveness* sehingga tidak dikenal adanya pengampunan debitor pailit.

Menurut Nindyo Pramono sepertinya kurang tepat jika karena dicabutnya status kepailitan, hanya debitor sendiri yang dibebani tanggung jawab atas biaya kepailitan padahal di dalam sebuah kepailitan

---

<sup>108</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 146.

kedudukan debitur tidak selalu sebagai pemohon pailit. Ketentuan ini bertentangan dengan nilai keadilan sila kedua Pancasila, karena tidak mampu menyeimbangkan tanggung jawab atas kepailitan tersebut. Selain itu, juga bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dengan hanya membebani debitur atas biaya kepailitan berarti telah gagal mewujudkan kesejahteraan sosial, gagal mewujudkan keadilan antara individu dengan individu lainnya, serta gagal dalam mewujudkan keadilan antara individu dengan negara.<sup>109</sup>

2. Pembagian harta pailit tidak mencukupi terhadap tuntutan piutang oleh kreditor.

Putusan pailit dikeluarkan oleh hakim, dalam hal ini hakim telah mempertimbangkan antara keadaan harta debitur dengan utang yang harus dibayar oleh debitur, mengingat keadaan kepailitan cukup dibuktikan bahwa debitur tidak mampu membayar utang, terdapat sedikitnya ada dua kreditor, dan satu utang telah dapat ditagih. Undang-undang kepailitan dan PKPU telah mengatur bahwa jika permohonan pailit sudah dikabulkan kemudian setelah diteliti harta pailit sangat sedikit hingga tidak mampu membayar biaya pengurusan, maka pada akhirnya status kepailitan dapat dicabut dan biaya atas kepailitan menjadi tanggung jawab debitur sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.<sup>110</sup>

Sementara itu posisi yang hendak dibahas pada sub bab ini tentunya posisi dimana kedudukan debitur pailit telah diteliti oleh hakim

---

<sup>109</sup> Nindyo Pramono dan Sularto, *Op.Cit.* hal. 239.

<sup>110</sup> *Ibid.*

dan hakim telah mempertimbangkan bila harta debitur pailit tersebut cukup untuk dilakukan pembagian.

Kendala yang sering terjadi dalam pencocokan piutang adalah ketidakcocokan tuntutan dari kreditor dengan harta debitor pailit saat kurator melakukan pembagian, hal inilah yang menyebabkan kedudukan harta debitor pailit tidak cukup karena tuntutan yang melebihi harta/bodel pailit. Harta kekayaan debitor dimaksudkan untuk mendistribusikan para kreditornya yang telah ada. Utang dalam kepailitan harus dibedakan menjadi utang pailit, utang yang tidak dapat diverifikasi dan utang harta/*boedel* pailit.

Menurut Marjan E Pane bahwa “dalam melakukan inventarisasi dan verifikasi utang piutang, kurator harus melakukan pengelompokan atas utang debitor pailit menjadi.”<sup>111</sup>

- a. utang pailit, yaitu utang yang telah ada pada waktu diputusnya kepailitan termasuk didalamnya utang yang dijamin dengan agunan/jaminan khusus;
- b. utang yang tidak dapat diverifikasi, yaitu utang yang timbul setelah putusan kepailitan dan karenanya tidak dapat dikelompokkan dalam utang pailit, tetap mempunyai hak tagih namun kedudukannya terbelakang dari utang pailit;
- c. utang harta/*boedel* pailit, yaitu utang yang timbul setelah keputusan pailit. Utang ini dibuat dengan tujuan untuk memperlancar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Utang harta/*boedel* pailit akan dilunasi dari harta/*boedel* pailit tanpa perlu diverifikasi dan mempunyai kedudukan didahulukan atas utang pailit.

Permasalahan kedudukan harta pailit tidak cukup muncul pada saat inventarisasi dan verifikasi utang piutang. Apabila tidak ada kesepakatan tentang piutang yang dibantah, maka diselesaikan dengan *renvoi* prosedur. *Renvoi* prosedur adalah bantahan kreditor terhadap daftar

---

<sup>111</sup> Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Di Indonesia*, Op.Cit, hal. 166.



tagihan (sementara) kreditor yang diakui / dibantah kurator. Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditor yang tidak menerima piutang yang diakui oleh kurator. Sidang renvoi dilaksanakan di Pengadilan Niaga. Dalam praktiknya, kurator membacakan daftar tagihan didepan hakim pengawas, panitera pengganti, kreditor, dan debitor beserta catatan berupa dasar hukum dan fakta fakta dari bukti dokumen tagihan dan dokumen perusahaan / individu yang diberikan kreditor berupa alasan menerima / menolaknya kurator terhadap tagihan tersebut. Setelah itu tiap kreditor dan debitor menandatangani persetujuan atas tagihan yang diakui kurator.<sup>112</sup>

Pihak yang berkeberatan atas daftar tagihan memberikan surat bantahan ke hakim pengawas, kemudian hakim pengawas membuat berita acara yang kemudian dituangkan dalam laporan hakim pengawas ke hakim majelis pengadilan niaga, kemudian hakim majelis pengadilan niaga menentukan kapan tanggal sidang renvoi dilaksanakan. Putusan renvoi harus sudah mendapatkan putusan hukum tetap terhitung tujuh hari sejak sidang pertama. Di dalam sidang renvoi tidak ada replik dan duplik, dalam sidang renvoi cukup dengan lampiran bukti - bukti dan dasar hukum mengapa membantah daftar yang disusun kurator, demikian juga kurator cukup membuat jawaban atas bantahan kreditor disertai bukti-bukti.

---

<sup>112</sup> Sunarmi, *Op.Cit*, hal.57.

Dalam prakteknya sidang renvoi terdiri dari sidang pembukaan, sidang pembuktian, dan sidang putusan.<sup>113</sup>

Dalam pelaksanaannya pembagian kreditur dalam kepailitan sesuai dengan prinsip *structured creditors* atau prinsip *structured prorata* yang diartikan sebagai prinsip yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan berbagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing antara lain kreditur separatis, preferen, dan konkruen. Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditur yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas *prorata (pari passu prorata parte)*.

Lilik Mulyadi, dalam bukunya yang berjudul *Perkara Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik : Dilengkapi Putusan Putusan Pengadilan Niaga*, mengatakan bahwa Putusan Hakim dalam perkara Kepailitan apabila dilihat dalam perspektif normatif yaitu Pasal 8 ayat (7) dan Pasal 16 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang mengisyaratkan bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga mempunyai kekuatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Pengaturan dapat dilaksanakan terlebih dahulu ini hakikatnya berorientasi kepada lembaga *uitvoerbaar bij voorrad* atau putusan serta-merta sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata.<sup>114</sup>

Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailit secara *mutatis mutandis* berlaku walaupun sedang ditempuh upaya

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hal. 57.

<sup>114</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik : Dilengkapi Putusan-Putusan pengadilan Niaga*, (Bandung : Alumni, 2010), hal. 153-154

hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitor.<sup>115</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya tentang asas yang diterapkan dalam pelaksanaan pembagian harta pailit yaitu Prinsip *pari passu pro rata parte* dan *paritas creditorium*. Penerapan kedua prinsip tersebut apabila dihubungkan dengan keadaan harta pailit tidak mencukupi dari tuntutan kreditor pailit maka lebih tepat digunakan adalah menggunakan prinsip *pari passu pro rata parte* dan hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Jadi apabila mengkaji dari sudut pandang kalimat “pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangannya menurut besar kecilnya piutang masing-masing” artinya bila dikaitkan dengan

---

<sup>115</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal 162-163.

barang debitor yang dapat diuangkan dari hasil penjualan benda-benda debitor akan dibagi menurut kedudukan kreditor preferen dan separatis menurut besar dan kecilnya piutang yang telah terverifikasi oleh kurator. Dengan demikian dapat disimpulkan prinsip *pari passu pro rata parte* memandang kedudukan kreditor bukan berdasarkan tuntutan dari para kreditor akan tetapi berdasarkan harta debitor yang dapat dibagi.

Sementara itu mengkaji dari sisi kalimat dalam Pasal 1132 KUH Perdata terdapat kalimat “kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” hal ini dapat menimbulkan 2 (dua) penafsiran yang berbeda karena kalimat “alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” tersebut tidak ada dijelaskan maknanya dalam penjelasan KUH Perdata sehingga hal ini nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menafsirkan kalimat “alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Menganalisis “Alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” apabila dianalisis terhadap harta pailit yang tidak mencukupi dengan kedudukan kreditor maka dapat disimpulkan:

1. Apabila tafsiran kalimat “alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” tersebut dimaknai dengan mengacu pada subjek kreditor preferen yang memiliki kedudukan yang istimewa dalam mendahului pembayaran utang pajak tentunya terhadap kedudukan harta pailit yang tidak cukup dibagi maka potensi seluruh harta yang tidak cukup dibagi tadi dapat menjadi tuntutan dari kreditor preferen, sebab kedudukan kreditor

preferen merupakan kedudukan yang memang harus didahulukan. Hal ini tentunya menyebabkan terjadi ketidakseimbangan dan ketidakadilan sebab bila tuntutan dari kreditor preferen melebihi harta debitor pailit dan menjadi hal dari kreditor preferen maka secara otomatis kedudukan kreditor separatis dan kreditor lainnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Sementara kreditor separatis dan kreditor lainnya juga memiliki hak yang sama.

2. Apabila tafsiran “alasan-alasan yang sah untuk didahulukan adalah mengacu pada subjek hukum kreditor separatis sebagai subjek yang berhak atas jaminan kebendaan maka tentunya dapat dipandang tepat akan tetapi dalam memenuhi tuntutannya juga tidak boleh melebihi hak dari kreditor preferen yang memiliki hak yang lebih tinggi sebab tentunya akan menyebabkan ketidakseimbangan dan keadilan bagi para pihak.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan terhadap gugatan salah satu pihak dalam renvoi prosedur terhadap tuntutannya terlebih harta pailit tidak mencukupi dalam hal ini maka kedudukan hakim dalam membuat suatu keputusan menjadi sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum.

## BAB IV

### ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MENURUT ASAS KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PERKARA PENGADILAN NIAGA NOMOR 57/PDT.SUS-RENOI PROSEDUR/2011/PN.NIAGA.JKT.PST

#### A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan Niaga

Menurut R. Soeroso, dalam bukunya yang berjudul Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dan Proses Persidangan, menyebutkan bahwa didalam struktur peradilan umum di Indonesia terbagi atas 3 (tiga), yaitu

.<sup>116</sup>

1. Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama yang memiliki wewenang mengadili semua perkara baik perkara pidana atau perdata;
2. Pengadilan Tinggi atau Pengadilan tingkat banding yang juga merupakan pengadilan tingkat kedua;
3. Mahkamah Agung yang merupakan Pengadilan tingkat terakhir dan bukan merupakan pengadilan tingkat ketiga. Perkara-perkara ini merupakan perkara yang dimintakan Kasasi dan yang diperiksa adalah penerapan hukumnya saja. Selain itu Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk melakukan Peninjauan Kembali terhadap kasus-kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi<sup>117</sup> Pasal 11

---

<sup>116</sup> R.Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata:Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta, Sinar Grafika, Edisi 4, 2001), hal. 5-6.

<sup>117</sup> Ahmad Yani dan Gunawan, *Op.Cit*, hal. 21.

ayat (1) UUK No. 37 Th. 2004 menyebutkan: “Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”. Permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas Kreditor, yang dapat mengajukan kasasi bukan saja Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, akan tetapi kasasi dapat diajukan oleh pihak Kreditor lain yang tidak berperkara pada tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit (Pasal 11 ayat (3) UUK).

Pada dasarnya acara peradilan niaga sama seperti acara peradilan perdata. Pasal 299 UUK dan PKPU menyebutkan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”. Hukum acara yang dipakai pengadilan niaga dalam perkara kepailitan pada dasarnya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hukum acara di pengadilan niaga dalam perkara kepailitan mempunyai ciri yang berbeda antara lain menurut Martiman Prodjohamidjojo:<sup>118</sup>

3. Acara dengan surat acara perdata di muka Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*). Acara dengan surat berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan

---

<sup>118</sup> Jonaedi Efendi, Kamus Istilah Hukum Populer, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 13-14.

tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapat kesempatan juga menerangkan kedudukannya dengan lisan.

4. Kewajiban dengan Bantuan Ahli. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan bantuan seorang ahli hukum. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan ketentuan tersebut adalah bahwa di dalam suatu proses kepailitan di mana memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis, agar segala sesuatunya berjalan dengan layak dan wajar.
5. Model Liberal-Individualistis. Hukum acara dalam proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa hakim pada intinya pasif. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang dijalankan oleh kedua belah pihak. Acara demikian adalah model liberal-individualistis.
6. Pembuktian Sederhana. Pemeriksaan perkara kepailitan Pengadilan niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di pengadilan niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti



secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditor yang lebih dari satu serta adanya fakta bahwa debitor atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga.

7. Waktu pemeriksaan yang terbatas. Pembaharuan yang tak kalah penting dari Undang-Undang Kepailitan ialah tentang pemeriksaan yang dibatasi waktunya. Undang-Undang Kepailitan menentukan batas waktu pemeriksaan serta tenggang waktu yang pasti tentang hari putusan pailit harus diucapkan. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
8. Putusan bersifat serta-merta (UVB). Menurut Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan, putusan atas permohonan pernyataan pailit di pengadilan niaga dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum. Undang-Undang

Kepailitan mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan. Meskipun putusan pailit tersebut dikemudian hari dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hierarki lebih tinggi. Semua kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan terhitung sejak putusan kepailitan dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan, tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.

9. Klausula Arbitrase. Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu No 1 Tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yuridiksi substantif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Yuridiksi substantif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang telah memberikan pengakuan *ekstra judicial* atau klausula arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, disini pengadilan niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 300 Undang-Undang Kepailitan.
10. Tidak tersedia Upaya Banding. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 dengan tegas menyatakan bahwa Upaya hukum

yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, terhadap putusan pada Pengadilan Niaga tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Meninjau putusan pailit tidak terlepas dengan pengadilan dimana daerah tempat kedudukan hukum debitor. Setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ketentuan bahwa :<sup>119</sup>

- a. Jika debitor telah meninggalkan wilayah NKRI, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
- b. Jika debitor adalah Persero suatu Firma, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Firma tersebut.
- c. Jika debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah NKRI tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah NKRI, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah NKRI.
- d. Jika debitor merupakan badan hukum pengadilan di mana badan hukum tersebut memiliki kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

---

<sup>119</sup> Munif Rochmawanto, *Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan*, Jurnal Independent Vol. 3 Nomor 2, hal. 32.

## **B. Tentang Duduk Perkara.**

### **1. Duduk Perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat**

#### **a. Alasan Mengajukan Gugatan<sup>120</sup>**

- 1) Hakim Pengawas telah menerima surat keberatan dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua No.S-4964/WPJ.07/KP.03/2014, tanggal 11 April 2014, Perihal : Keberatan dan Permohonan
- 2) Bahwa segera setelah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor : 57/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 13 Oktober 2011 dan Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan dengan Nomor: 57/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 7 April 2014 tentang : Penunjukkan surat kabar
- 3) Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin rapat-rapat kreditur yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
- 4) Bahwa selanjutnya telah diajukan keberatan perlawanan oleh Kreditur Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua terhadap pembagian harta Pailit dari PT.Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit), yang daftarnya dibuat dan diumumkan Kurator dengan alasan bahwa hutang Pajak harus di dahulukan dari pembagian harta pailit

---

<sup>120</sup> Putusan Nomor 57/PDT.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam duduk perkara.

- 5) Bahwa Hakim Pengawas telah berupaya sedemikian rupa untuk mensosialisasikan masalah pemberesan tersebut. oleh karena keadaan demikian itu maka Hakim Pengawas berpendapat bahwa daftar pembagian untuk Para Kreditur atas harta PT.Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) telah memenuhi rasa keadilan sesuai ketentuan, walaupun demikian Hakim Pengawas menyerahkan penyelesaian tersebut kepada Majelis Hakim dengan mekanisme Renvoi Prosedur
- 6) Pada tanggal 11 April 2014 telah mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian sekaligus Daftar Pembagian PT.Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit), sebagai berikut:
- a) Bahwa dari total piutang pajak sebesar Rp.90.717.108.949,- (sembilan puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua hanya memperoleh pembagian sebesar Rp.2.913.199.683,- (dua milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebesar Rp.1.165.279.873,- (satu milyar seratus enam puluh lima dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari hasil penjualan Asset bebas dan sebesar Rp.1.747.919.810,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta

sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah)  
dari presentase penjualan harta fidusia.

- b) Bahwa Kreditor Separatis, yaitu Tennan Metals, memperoleh pembagian sebesar Rp.1.747.919.810,- ((satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah)
- c) Bahwa Kreditor Separatis sesuai Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) adalah “Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi”
- d) Bahwa Pasal 1137 KUHPer menyatakan “Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.”
- e) Bahwa Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) menyatakan Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak, Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut Jo Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang menyatakan “Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak”, Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya.

- 7) Bahwa kedudukan piutang pajak mempunyai hak mendahulu dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator PT.Artika Optima Inti (dalam pailit) dan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.,

- 8) Bahwa perbuatan Kurator yang telah membuat Daftar Pembagian yang tidak menempatkan Piutang Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua sebagai prioritas pembayaran.
- 9) Bahwa perbuatan yang tidak mengindahkan peraturan perundangundangan yang telah dinyatakan secara tegas dan jelas merupakan pelanggaran dan perlawanan terhadap undang-undang. Penyusunan Daftar Pembagian oleh Kurator PT.Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) dan yang disetujui oleh Hakim Pengawas PT.Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) yang tidak didasarkan pada undang-undang dan bahkan bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang merupakan perbuatan yang telah melawan hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara/pendapatan pajak sebesar Rp.87.778.909.266
- 10) Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP secara berturut-turut menyatakan bahwa Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: Badan oleh pengurus, badan yang dinyatakan pailit oleh kurator, wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut"



- 11) Oleh karena itu, selaku wakil dan penanggung pajak PT.Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit), Kurator harus menyusun laporan keuangan dan surat pemberitahuan (SPT) pajak PT.Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit) dengan jelas, benar dan lengkap
- 12) Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam proses kepailitan, Piutang Pajak merupakan hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1137 KUHPer jo Pasal 21 UU KUP) dan Kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut (Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP jo Pasal 1 angka 3 UU PPSP). Dengan kata lain Kurator seharusnya mendahulukan/mengutamakan pelunasan Utang Pajak sebesar Rp.90.717.108.949,- (Sembilan puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah) dari boedel pailit PT.Yinchenindo Mining Industry
- 13) Bahwa pembagian yang dilakukan oleh kurator kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua hanya sebesar Rp.2.913.199.683,- (dua milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), ini berarti kurator telah melanggar undang-undang dan tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara

dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua.

- 14) Bahwa dengan tidak tertagihnya sisa piutang pajak sebesar Rp.87.778.909.266 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) lewat proses kepailitan ini, maka keuangan negara akan dirugikan karena penerimaan negara akan berkurang sebesar Rp.87.778.909.266,- (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- 15) Bahwa dalam hal tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam keberatan ini tidak dapat dilunasi secara penuh oleh harta pailit/boedel maka pelunasannya akan didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP)
- 16) Bahwa dengan demikian kurator sebagai Wakil PT.Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau secara renteng terhadap pelunasan sisa

piutang pajak yang tidak dilunasi oleh kurator dalam proses kepailitan ini, mengingat kurator seharusnya melunasi terlebih dahulu seluruh piutang pajak

b. Pertimbangan dan putusan Hakim.

Dalam pertimbangan hakim, hakim mempertimbangkan dalil dari kurator yang sebelumnya mengajukan tanggapan/jawaban dengan memperhatikan independensi, asas keadilan dan asas keseimbangan. Sehingga menurut hakim adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Kreditor Preferen dan Separatis apabila kantor pajak memperoleh porsi Asset Bebas seluruhnya, ditambah perentase dari Fidusia dengan porsi yang besar pula (50%). Sedangkan Tennant Metals tetap harus memperoleh Fidusia, karena dasar bahwa jaminan fidusia berada di luar kepailitan, namun Tennant Metals mendapat porsi yang kecil (50%) dan tidak memperoleh asset bebas.<sup>121</sup>

Selain itu, apabila dilihat dari peran Kreditor Separatis dengan Kreditor Preferen dalam memberikan modal atau selaku investor kepada Debitor Pailit, sehingga usaha Debitor Pailit dapat berjalan dan memberi penghidupan kepada orang banyak atau para pekerja maka jelas Kreditor Separatis lebih berperan, oleh karena itu janganlah Tennant Metals tidak memperoleh porsi sama sekali' yang terpenting adalah pajak memperoleh

---

<sup>121</sup> Putusan Nomor 57/PDT.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Pertimbangan Hakim.

bagian yang besar dan apabila ada asset bebas dari Debitor Pailit ditemukan kemudian maka Pemohon akan memperoleh semua.<sup>122</sup>

Menimbang, bahwa pasal 138 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemegang jaminan fidusia termasuk kreditor yang didahulukan pembayarannya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, bahkan apabila hasil penjualan benda agunan tidak mencukupi, dapat mengajukan hak-hak yang dimiliki oleh kreditor konkuren.<sup>123</sup>

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil keberatan Pembantah yang juga dibenarkan oleh Terbantah bahwa pembagian harta pailit dari PT.YINCENINDO MINING INDUSTRY, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua memperoleh pembagian sebesar Rp.2.913.199.683,- (dua milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebesar Rp.1.165.279.873,- (satu milyar seratus enam puluh lima dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari hasil penjualan Asset bebas, dan sebesar Rp.1.747.919.810,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari presentase penjualan harta fidusia.<sup>124</sup>

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada ketentuan pasal 138 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo pasal 27 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di atas, seharusnya Terbantah mendahulukan TENNANT METALS Pty Ltd untuk mendapat pembayaran piutangnya dari hasil lelang atau penjualan benda yang menjadi agunan fidusia tersebut, baru apabila terdapat sisa dapat dibagikan kepada kreditor-kreditor lainnya, karena pada dasarnya benda jaminan fidusia status hukumnya berada pada kekuasaan penerima fidusia

Menimbang, bahwa oleh karena daftar pembagian harta pailit dari PT.YINCENINDO MINING INDUSTRY yang dibuat oleh Termohon beralasan dan dapat diterima, maka dalil Pembantah tentang hal tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

## 2. Duduk Perkara Perdata Khusus di tingkat kasasi.

### a. Alasan mengajukan gugatan<sup>126</sup>

- 1) Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembantah pada tanggal 7 Juli 2014, terhadap putusan tersebut, Pembantah melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15 Kas/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur Pailit/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2014 itu juga;
- 2) Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Terbantah pada tanggal 16 Juli 2014, kemudian Terbantah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juli 2014
- 3) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian PT Yinchenindo Minag Industry telah salah dengan

---

<sup>126</sup> Alasan gugatan dalam Putusan Nomor 511 K/Pdt.SusPailit/2014.

mempersamakan kedudukan mendahulukan Pemohon Kasasi dengan Kreditor Separatis :

- a) dalam kenyataannya Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 189 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi: Yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewanya dibantah, dan Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan Pasal 55
- b) Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud yang menyebutkan pembayaran kepada Kreditor yang memiliki hak yang diistimewakan disebut terlebih dahulu daripada pembayaran kepada Kreditor dengan jaminan fidusia sangatlah jelas memisahkan kedudukan Kreditor yang mempunyai hak istimewa dengan Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia. Dengan demikian ketentuan dimaksud menegaskan bahwa kedudukan Kreditor Pemilik Hak yang diistimewakan lebih mendahului dibanding Pemegang Jaminan Fidusia dalam hal menerima pembayaran dari hasil penjualan harta pailit. Oleh karena itu telah jelas bahwa Negara sebagai pemilik piutang pajak memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang dimana pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran kepada Kreditor- Kreditor

lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia.

- c) Bahwa Majelis Hakim dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian PT. Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor 57/PAILIT/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., sama sekali tidak memperhatikan kedudukan Negara dalam hal ini Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan yang memiliki hak mendahulu yang melebihi segala hak mendahulu lainnya.
- d) Bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit maka Kurator yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit kepada pemegang saham atau Kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
- e) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian PT. Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor 57/PAILIT/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst., telah salah dengan tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan terhadap biaya tahap pengurusan kepailitan dan penghasilan bunga atas penjualan harta pailit, hal mana kesalahan tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan dalam perkara *a quo*;



b. Pertimbangan dan putusan hakim Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Juli 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>127</sup>

- 1) Bahwa telah benar ketika saldo hasil pemberesan harta Debitor Pailit tidak cukup untuk membayar semua kewajiban Debitor Pailit kepada Para Kreditor maka pemberian saldo harta Debitor dilakukan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan (dalam hal ini Pemohon Kasasi telah memperoleh 62,5% dari total saldo yang dibagi) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo*, karena itu adalah telah benar bantahan Pembantah ditolak seluruhnya;
- 2) Bahwa lagipula keberatan Pemohon Kasasi berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Mahkamah Agung;
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

---

<sup>127</sup> Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 Juli 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING DUA tersebut harus ditolak;

3. Dalam duduk perkara di tingkat Peninjauan Kembali tentang keberatan daftar pertama

a. Alasan mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembantah telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus- Pailit/2014 tanggal 28 Oktober 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2015, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 7 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04 PK/Pdt.Sus/ Pailit/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN Niaga Jkt. Pst., permohonan tersebut disertai dengan

memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga; Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdapat Kekeliruan yang Nyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi dalam Perkara *A quo*; Bahwa Pasal 295 Undang Undang Kepailitan dan PKPU mengatur:
  - a) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
  - b) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.
- 2) Bahwa pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas merupakan pertimbangan yang keliru dengan dasar sebagai berikut:
  - a) Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti*, yaitu putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat halaman 22 butir pertama menyatakan bahwa telah benar ketika saldo hasil pemberesan harta debitor pailit tidak cukup untuk membayar semua kewajiban Debitor Pailit kepada Kreditor maka pemberian saldo harta Debitor dilakukan

berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan (dalam hal ini Pemohon Kasasi telah memperoleh 62,5% dari total saldo yang dibagi) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo*, karena itu adalah telah benar bantahan Pembantah ditolak seluruhnya”;Terkandung kekeliruan yang sangat nyata berupa keliru dalam memahami dan menerapkan hukum kepailitan terutama mengenai hirarki kedudukan kreditor dalam suatu perkara kepailitan. Kekeliruan ini pun luput dari koreksi bahkan dikuatkan oleh pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung RI;

- b) Bahwa kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim baik *Judex Facti* maupun Majelis Hakim Agung pada tingkat Mahkamah Agung RI dalam Renvoi Prosedur *a quo* sebagaimana disebutkan dalam huruf a di atas, berpangkal dari diabaikannya ketentuan hukum yang memberikan posisi tagihan pajak sebagai tagihan yang harus didahulukan daripada tagihan Kreditor Separatis sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali.
- c) Bahwa selain kedudukan tagihan pajak yang seharusnya didahulukan daripada tagihan separatis di dalam Daftar Pembagian PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit), dalam pemberesannya pun kurator yang ditugasi untuk melakukan pemberesan tersebut dilarang membagikan harta Wajib Pajak

dalam pailit kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung RI dalam Renvoi Prosedur perkara kepailitan Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/ 2011/PN Niaga Jkt. Pst. terhadap Daftar Pembagian PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit), telah salah dengan tidak memerintahkan kepada Kurator PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) untuk memenuhi kewajibannya mentaati peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat 3a Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP);

- d) Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud yang menyebutkan pembayaran kepada kreditur yang memiliki hak yang diistimewakan disebut terlebih dahulu daripada pembayaran kepada kreditur dengan jaminan fidusia sangatlah jelas memisahkan kedudukan kreditur yang mempunyai hak istimewa dengan kreditur pemegang jaminan fidusia, dengan demikian ketentuan dimaksud menegaskan

bahwa kedudukan kreditur pemilik hak yang diistimewakan lebih mendahulu dibanding pemegang jaminan fidusia dalam hal menerima pembayaran dan hasil penjualan harta pailit. Oleh karena itu telah jelas bahwa negara sebagai pemilik piutang pajak memiliki hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang dimana pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran kepada kreditur-kreditur lainnya. termasuk dan tidak terbatas kepada kreditur pemegang jaminan fidusia;

- e) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN Niaga Jkt. Pst. karena tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil dan petitum Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Kasasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dalil-dalil bantahan/perlawanannya;

b. Pertimbangan dan putusan hakim Mahkamah Agung.

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 7 Mei 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 18 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak ditemukan suatu kekhilafan dan ataupun kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) hasil pemberesan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua hutang debitur, maka pembagian dilakukan sesuai azas keadilan dan keseimbangan;
- 2) Bahwa pihak pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh hasil yang jauh lebih besar yaitu sebesar 62,5% dari hasil pemberesan harta pailit, sisanya dibagikan kepada kreditur lain secara berkeadilan;
- 3) Oleh karena itu alasan Peninjauan Kembali hanya merupakan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris* serta merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, sehingga bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali.
- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING DUA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

### **C. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Berdasarkan Asas Keadilan Dan Kemanfaatan.**

Dari uraian pertimbangan hakim dan putusan hakim mulai dari tingkat pengadilan niaga, tingkat kasasi sampai dengan tingkat peninjauan kembali dapat ditarik kesimpulan pada dasarnya hakim mempertimbangkan 4 (empat) hal utama yaitu:

1. mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan porsi yang diperoleh oleh kreditor preferen dan kreditor separatis.

2. mempertimbangkan pasal 138 Undang-Undang Kepailitan tentang kedudukan dari kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik dan hak tanggungan atas kebendaannya.
3. Ketentuan hakim mempertimbangkan pasal 138 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo pasal 27 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di atas, seharusnya Terbantah mendahulukan TENNANT METALS Pty Ltd untuk mendapat pembayaran piutangnya dari hasil lelang atau penjualan benda yang menjadi agunan fidusia tersebut, baru apabila terdapat sisa dapat dibagikan kepada kreditor-kreditor lainnya, karena pada dasarnya benda jaminan fidusia status hukumnya berada pada kekuasaan penerima fidusia.
4. Pertimbangan hakim di tingkat kasasi dan peninjauan kembali juga pada dasarnya menguatkan putusan hakim pada tingkat pengadilan niaga yang dasarnya menegaskan hasil pemberesan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua hutang debitur, maka pembagian dilakukan sesuai azas keadilan dan keseimbangan dan hasil yang diperoleh oleh kreditor preferen dalam hal ini kreditor pajak tetap yang jauh lebih besar yaitu sebesar 62,5% dari hasil pemberesan harta pailit, sisanya dibagikan kepada kreditor lain secara berkeadilan;

Apabila menganalisis putusan tersebut perlu juga kiranya memperbandingkan putusan hakim dengan kasus lain seperti kasus kedudukan kreditor pajak KPP Madya Jakarta Pusat, tagihan yang



diverifikasi adalah Rp. 46,2 milyar yang diakui sebagai hak dari KPP dari tuntutan KPP sebesar Rp. 369,21 milyar. Dengan merujuk antara lain pada putusan Mahkamah Agung No. 795K/Pdt.Sus/2010, dalam perkara KPP Madya Tangerang dan KPP Penanaman Modal Asing Wilayah IV vs Tim Kurator PT Koryo Internasional Indonesia. Akan tetapi rujukan tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 74PK/Pdt.Sus/2011. Majelis PK menilai 'terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata' dalam putusan No. 795K/Pdt.Sus/2010. Kekeliruan itu ialah mengenai hasil penjualan boedel pailit, disebut 82 miliar, padahal sebenarnya sekitar 25 miliar rupiah. Lagipula, secara prinsipil hak tanggungan/hipotik menduduki peringkat di atas hak istimewa, kecuali yang dinyatakan sebaliknya (Pasal 1134 KUH Perdata).

Dalam perkara lain Putusan MA No. 017K/N/2005 pada intinya menyatakan utang pajak adalah utang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu dibanding utang lainnya. Rujukan hakim adalah UU No. 19 Tahun 1997, sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Namun, dalam pertimbangan putusan No. 09 K/N/2009 (KPP Besar Dua melawan kurator PT Mitra Asindo Utama), majelis hakim agung menyatakan tidak ada dasar untuk menganggap Undang-Undang Perpajakan sebagai *extra ordinary rules*. Dalam perkara ini sepenuhnya dipakai UU No. 37 Tahun 2004.

Dalam Pertimbangan hakim, sering juga hakim menyinggung mengenai asas keseimbangan atau proporsionalitas dan asas keadilan pembagian boedel pailit. Dalam putusan MA No. 74PK/Pdt. Sus/2011, misalnya, majelis menyatakan pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai asas keseimbangan sudah tepat dan benar. Asas keseimbangan mengandung arti di satu sisi terdapat ketentuan yang bisa mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor tidak jujur; dan di sisi lain ada ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak bertiktikad baik. Asas keadilan mengandung arti bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Asas ini bertujuan mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor tanpa mempedulikan kreditor lainnya.

Menganalisis putusan-putusan diatas pada dasarnya hakim tetap mempertimbangkan jumlah harta pailit yang ada dan membagi dengan dasar keadilan dan keseimbangan Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsuilititeit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>128</sup> Dalam bukunya *Inleiding Tot DE Studie Van Het Nederlandse Recht*, Apeldoorn mengatakan bahwa :

“Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk menciptakan kedamaian hukum harus diciptakan

---

<sup>128</sup> Ahmad Ali, *Op.Cit.* hal. 85.

masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama yang lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya”

Pertimbangan hakim dalam putusan dengan mengacu pada dasar pertimbangan mendahulukan kedudukan kreditor separatis karena memiliki hak atas jaminan kebendaan merupakan pertimbangan hukum yang mengacu pada aturan hukum yaitu pasal 138 Undang-Undang Kepailitan, sementara itu jika diperhatikan dalam pertimbangannya hakim tidak mempertimbangkan kedudukan dasar hukum yang didalilkan oleh kreditor pajak yakni Undang-Undang Pajak yang pada dasarnya memiliki hak untuk didahulukan pelunasannya. Disini apabila dianalisis tentu putusan hakim jelas dapat menimbulkan ketidakadilan sebab hakim hanya mempertimbangkan posisi kedudukan dari kreditor separatis. Akan tetapi tujuan hukum seperti yang telah diuraikan sebelumnya adalah “mengatur tata tertib.....harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain.....”

Dengan demikian tujuan hukum tersebut pada dasarnya bukan hanya mempertimbangkan hukum materil saja, akan tetapi berusaha untuk memperimbang antara kepentingan dari kreditor pajak sebagai kreditor preferen yang kedudukannya harus didahulukan dan kepentingan kreditor separatis yang kedudukannya juga harus didahulukan oleh jaminan kebendaan. Menganalisis dari sisi dasar hukum masing-masing diatas seakan terjadi tumpang tindih antara kedua aturan yang mengatur mengenai kedudukan kreditor preferen dengan kedudukan kreditor

separatis yang sama-sama memiliki sifat kedudukan yang harus didahulukan.

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (*problem denken*). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.<sup>129</sup>

Selain itu dalam pertimbangan lain hakim melihat kedudukan dari jumlah harta debitor pailit yang tidak mencukupi tersebut dengan membandingkan dari porsi pembagian yang didapat oleh kreditor pajak dengan bagian porsi yang lebih banyak yakni 62,5% dari hasil pemberesan harta pailit, sisanya dibagikan kepada kreditur lain secara berkeadilan sehingga dengan demikian baik kreditor preferen maupun kreditor separatis sedapat mungkin mendapat apa yang menjadi haknya meskipun belum dapat memuaskan keinginan dari para pihak khususnya kreditor pajak.

---

<sup>129</sup> HM Soerya Respationo, *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksi dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Yustisia, No.86 Mei- Agustus 2013,( Surakarta :Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta) , hal. 43.

Melihat kedudukan dari kreditor preferen maupun kreditor separatis sudah seharusnya tunduk kepada aturan hukum kepailitan dengan mengacu kepada Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu asas yang menyatakan bahwa undang undang yang lebih khusus mengesampingkan undang undang yang lebih umum. Apabila membandingkan antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Pajak, maka Undang-Undang Kepailitan yang lebih khusus (*Special Law*) karena hanya mengatur hal-hal kepailitan , sedangkan Undang-Undang Pajak mengatur mengenai ketentuan perpajakan dan pembayaran pelunasan pajak (*General Law*). Sehingga bila mengkaitkan dengan kasus pembagian harta pailit yang tidak cukup dan debitor juga telah dinyatakan pailit oleh hakim pengadilan maka seluruh pihak wajib mengikuti jalannya proses pengurusan sampai dengan pembagian harta pailit mengikut aturan hukum dalam kepailitan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Adapun dasar hukum pengaturan mengenai pengurusan dan pemberesan pembagian harta pailit dapat dilihat dari definisi kurator. Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan kurator adalah “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.” Dalam hal ini langkah yang dilakukan kurator dalam proses pengurusan harta pailit adalah dilakukan pengumuman dan rapat kreditor, melanjutkan usaha (*On Going Concern*), rapat verifikasi (pencocokan piutang), perdamaian. Sedangkan apabila tidak ada perdamaian maka akan langsung dilaksanakan tahap pemberesan. Sedangkan pada tahap pemberesan harta pailit menurut pasal 16 ayat 1 Undang-undang Kepailitan dan PKPU adalah mengusulkan serta melaksanakan penjualan harta pailit serta membuat daftar pembagian harta pailit.
2. Apabila pembagian harta pailit tidak cukup pada saat inventarisasi dan verifikasi utang piutang maka dari sisi kedudukan kreditor pailit yang merasa pembagian harta pailit oleh kurator tidak cocok maka kreditor dapat menempuh upaya hukum melalui *renvoi* prosedur, sementara itu kurator tetap akan menjalankan tugasnya melakukan pembagian

dengan berdasarkan prinsip pelaksanaannya yakni menggunakan prinsip *pari passu pro rata parte* dan hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

3. Putusan Hakim pada tingkat pengadilan niaga, kasasi dan peninjauan kembali telah mencerminkan keadilan bagi seluruh para pihak, sebab dalam putusannya hakim tetap mengacu pada keseimbangan hak antara para pihak meskipun dalam undang-undang pajak mengkehendaki kedudukan dari kreditor pajak harus didahulukan, melalui pasal 138 Undang-Undang Kepailitan tentang kedudukan dari kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik dan hak tanggungan atas kebendaannya, hakim memberikan kedudukan mendahulukan kepada kreditor separatis tetapi tetap tidak mengabaikan kedudukan kreditor preferen. Sebab dalam putusan hakim tetap mempertimbangkan porsi dari kedudukan kreditor preferen lebih besar yakni 62,5% dari hasil pemberesan harta pailit, sisanya dibagikan kepada kreditor lain secara berkeadilan.

**B. Saran.**

1. Aturan dan prosedur hukum pada saat debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga merupakan aturan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang kepailitan oleh sebab itu kepada seluruh kreditor yang memiliki hak untuk menagih utang dari debitur hendaknya mengikuti dan menerima aturan dan proses khususnya dalam proses pembagian harta pailit sebab bagaimanapun juga proses kepailitan mulai dari pemberesan sampai dengan pembagian harta pailit merupakan proses yang panjang dan pembagian dilakukan oleh kurator tetap memperhatikan faktor-faktor yang ada seperti salah satunya harta debitur tidak dapat mencukupi untuk menutup tuntutan kreditor pada saat pailit.
2. Pembagian harta pailit terhadap salah satu contoh harta pailit tidak cukup memang menimbulkan polemik antara kreditor preferen dengan kreditor separatis, oleh sebab itu dibutuhkan peranan dari pemerintah khususnya bila diperlukan dibuat atau dibentuk suatu aturan hukum mengenai kedudukan kreditor bilamana harta debitur pailit tidak cukup, sebab meskipun kreditor diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan tetapi tentunya proses tersebut membutuhkan waktu dan memakan biaya yang besar bagi para pihak, bukan hal itu saja melainkan hak dari kreditor lain juga dapat terkena imbas bilamana ternyata pada saat proses pengadilan memenangkan kreditor yang mengajukan gugatan tersebut.



3. Beberapa kasus mengenai pembagian harta pailit menyangkut kedudukan yang menghadapkan kreditor preferen dan kreditor separatis menimbulkan polemik dan hakim dalam memberikan putusannya kebanyakan mempedomani pada asas keseimbangan yang berkeadilan, oleh sebab itu kedepan diharapkan bagi segenap hakim yang ada di Indonesia dapat mengambil contoh-contoh kasus yang terjadi khususnya mengenai pembagian harta pailit yang tidak cukup dihadapkan kepada kedudukan kreditor preferen dan kreditor separatis untuk sekiranya menjadikan putusan-putusan tersebut sebagai bahan dan bentuk pertimbangan hakim-hakim pengadilan niaga selanjutnya atau bila perlu menjadikan putusan-putusan tersebut menjadi sebuah yurisprudensi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Ahmad, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, 2002, Jakarta: Gunung Agung.
- Brata, Sumadi Surya, 1998, *Metodologi Penelitian* , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, 1991, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Efendi, Jonaedi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, 2002, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hartanto , J. Andy, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Surabaya : LaksBang Justitia
- Hoff , Jerry, 2001, *Undang Undang Kepailitan di Indonesia (Idonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Jakarta:Tatanusa.
- Ikhsanuddin, Moch Fasluqi, *Skripsi berjudul Utang Pajak Sebagai dasar Permohonan Pailit*, 2016, Surabaya : Universitas Erlangga.
- Komisi Kateketik Keuskupan Agung Semarang, *Mewujudkan Hidup Beriman dalam Masyarakat dan Lingkungan Hidup*, 2006, Yogyakarta: Kanisius.
- Kartono, *Kepailitan dan Penundaan*, 1974, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lubis , M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.
- Marzuki, Pieter Mahmud (a), 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Marbun, Rocky, *Kamus Hukum*, 2012, Jakarta: Transmedia Pustaka

- Mulyadi, Lilik, 2010, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik : Dilengkapi Putusan-Putusan pengadilan Niaga*, Bandung : Alumni.
- Maleonf, Lexi J, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya.
- ND , Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta :Pustaka Pelajar
- Pramono, Nindyo dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta: Andi
- Stanly, L. L. Poulson, *Pengantar Teori Hukum*, 2012, Bandung: Nusa Media.
- Situmorang, Mosgan, *Tinjauan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang*, 1999, Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, 2009, Medan : USU Press.
- Sunarmi, 2010, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Edisi 2*, Jakarta : SoftMedia.
- Suci, Ivida Dewi Amrih, 2011, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta:Laksbang Pressindo.
- Shubban , Hadi, *Hukum Kepailitan*, 2009, Jakarta : Kencana.
- , *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma Dan Praktik Di Pengadilan*, 2008, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suci , Ivida Dewi Amrih, 2011, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta:Laksbang Pressindo.
- Seminar Sehari Revitalisasi, 2004, *Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas dan Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum.
- Suherman, E, *Kepailitan*, 1988, Bandung: Binacipta.

- Soekanto , Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R., *Praktek Hukum Acara Perdata:Tata Cara Dan Proses Persidangan*, 2001, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi 4.
- Sumaryono, E, 2002, *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kondrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta : Kanisius.
- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, 2005, Surakarta : Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS
- H.F.A. Vollmar, *De Faillissementswet*, 1953, cetakan IV.
- Waluyo, Bernadete, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, 1999, Ctk. Pertama, Bandung: Mandar Maju.
- Wuisman ,J.J.J M, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid 1 ,Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Yuhelson, *Tugas Dan Kewenangan Kurator Dalam Proses Kepailitan*, 2006 Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI.
- Yani, Achmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, 2004, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **B.Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia, Undang Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( *Burgerlijke Wetboek*)
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 57/ PDT. SUS- RENVOI PROSEDUR/2011/PN.NIAGA.JKT.PST
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

Putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit.2015.

### C. Makalah dan Jurnal

HM Soerya Respationo, *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksi dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Yustisia, No.86 Mei- Agustus 2013, Surakarta :Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Rilda Murniati, *Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No 1 Januari-April Fakultas Universitas Lampung: 2011

Munif Rochmawanto, *Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan*, Jurnal Independent Vol. 3 Nomor 2

Pupu Saeful Rahmat, " *Jurnal Penelitian Kualitatif*", Equilibrium vol.5 no.9 diakese dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf> pada tanggal 09 April 2017.

Rudhi, Prasetya, *Likuidasi Sukarela dalam Hukum Kepailitan*, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996.

Rusli, Hardijan, " *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999)

Syahdeini, Sutan Remy, *Pengertian Utang Dalam Kepailitan*, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Januari 2002

Wantu, Fence M, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007.

### D. Internet

Bintang Partogi Mangaratua Sibuea, *Prinsip Creditorium Dalam Kepailitan*, artikel hukum Pedia.com diakses dari <http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/prinsip-paritas-creditorium-dalam-kepailitan> pada tanggal 10 Mei 2018